

KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA IKAN KERING DI KOTA BENGKULU

Pelaku usaha (pedagang) khususnya usaha kecil menengah di Kota Bengkulu tidak/belum mendaftarkan merek untuk produk yang mereka pasarkan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek pada produk industri membuat masyarakat atau pelaku usaha terkesan enggan dan tidak peduli terhadap pentingnya pendaftaran merek ini. Artinya kesadaran hukum akan pentingnya merk dagang sangat minim, hal ini terbukti dari banyaknya pelaku usaha pedagang ikan kering banyak yang belum mendaftarkan merk usahanya. Dengan tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Buku ini diharapkan dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran terhadap bidang hukum khususnya pelaku usaha diberbagai bidang industri pedagang ikan kering dan bidang usaha lainnya.



Penerbit CV Zizie Utama

CV. Zizie Utama
Alamat Redaksi : Jln. DP.Negara V
Perum Tanjung Gemilang RT.08 RW.02
Kel. Sulairani Kec. Selebar
Kota Bengkulu
Propinsi Bengkulu
Telp. 085369179919
email : info@zizie.co.id
penerbitzizie@gmail.com

ISBN 978-623-7558-14-9



Penerbit CV Zizie Utama

KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA IKAN KERING DI KOTA BENGKULU

ZULKARNAIN S & WERY GUSMANSYAH



KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA IKAN KERING DI KOTA BENGKULU

Dr.ZULKARNAIN,S, M.Ag
WERY GUSMANSYAH, MH

**KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA
IKAN KERING DI KOTA BENGKULU**

Oleh:

**DR. ZULKARNAIN, S., M.AG
WERY GUSMANSYAH, MH**

PENERBIT CV.ZIGIE UTAMA

**KESADARAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA IKAN
KERING DI KOTA BENGKULU**

Penulis :

Dr. Zulkarnain. S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

Editor:

Dr. Imam Mahdi, SH., MH

Layout Isi dan Sampul

Dodi Isran

ISBN 978-623-7558-14-9
vi, 152 Hlm, 14 x 21 Cm

Diterbitkan Oleh:

Penerbit CV. Zigie Utama
Jln. Pancur Mas, RT 8 RW 2 Kel. Sukarami
Kec. SelebarKota Bengkulu 0853-6917-9919

www.zigie.co.id

Anggota IKAPI No. 003/BENGGKULU/2019

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis dan Penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis dan Penerbit.

Isi Diluar Tanggungan Penerbit
Cetakan Pertama, Desember 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan, tuntunan dan perlindungan Nya, sehingga buku dengan Judul *“Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu”* dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dalam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW.

Buku ini diharapkan dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran terhadap bidang hukum khususnya pelaku usaha diberbagai bidang. Buku ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Tidak ada kata yang paling indah disampaikan selain ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam pembuatan buku ini.

Buku ini hasil dari penelitian, penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita semua., Aamiin.

Bengkulu, Desember 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 3
- C. Tujuan Penelitian 4
- D. Manfaat Penelitian 4
- E. Kajian Penelitian 5
- F. Metode Penelitian 7
- G. Rencana Program/Sistematika Penelitian 10

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Teori Kesadaran Hukum 13
- B. Teori Perlindungan Hukum 30
- C. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
32
- D. Teori Bantuan Hukum 33

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kota Bengkulu 37
- B. Kependudukan 60
- C. Perekonomian 72
- D. Jaringan Transportasi 107
- E. Fasilitas dan Utilitas Perkotaan 112

- F. Pariwisata 125
- G. Intensitas Pembangunan Kota 134
- H. Identifikasi Potensi dan Masalah 135

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab tingkat kesadaran hukum bagi pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu 141
- B. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu 148

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 149
- B. Saran 149

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan wisata Bengkulu saat ini bukan hanya bisa dinikmati pemandangan alamnya saja tetapi sepanjang jalan pantai panjang di Kota Bengkulu dimanfaatkan pula oleh masyarakat sekitar untuk memasarkan hasil produksi ikan kering yang mereka tangkap langsung dari laut. Kondisi masyarakat disekitar pantai tersebut cukup memprihatinkan dari segi perekonomian sebagian besar masyarakat di Kota Bengkulu pinggiran pantai adalah masyarakat miskin. Dimana mata pencaharian utama adalah sebagai nelayan, hasil dari nelayan berupa ikan salah satunya dijadikan produk olahan ikan kering dimana produk tersebut dari hasil observasi masih ada yang belum di daftarkan mereknya oleh para pelaku usaha. Sebagai warga asli Bengkulu tentu saja hal ini cukup memprihatinkan bagi kami selaku peneliti dimana berangkat dari kasus-kasus yang ada, banyak produk asli Indonesia yang tidak didaftarkan mereknya akhirnya di klaim sebagai produk Negara lain. Peneliti melihat potensi besar yang terdapat pada produk olahan ikan kering oleh warga Kota Bengkulu ini jika mereka diberikan pemahaman melalui pendampingan hukum yakni tentang pentingnya pendaftaran merek pada produk usaha maka usaha tersebut mempunyai

peluang memasarkan usahanya hingga ke luar negeri.

Permasalahan yang timbul adalah banyak para pelaku usaha (pedagang) khususnya usaha kecil menengah di Kota Bengkulu tidak/belum mendaftarkan merek untuk produk yang mereka pasarkan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek pada produk industri membuat masyarakat atau pelaku usaha terkesan enggan dan tidak peduli terhadap pentingnya pendaftaran merek ini. Artinya kesadaran hukum akan pentingnya merk dagang sangat minim, hal ini terbukti dari banyaknya pelaku usaha pedagang ikan kering banyak yang belum mendaftarkan merk usahanya. Dengan tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya. Hal ini tidak saja mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat bingung pelanggannya, tetapi dapat juga merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih

rendah. Hal ini sungguh sangat merugikan pelaku usaha.

Dari pengamatan awal menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pedagang ikan kering di Kota Bengkulu, dimana mereka menganggap bahwa pendaftaran merek belum begitu penting, selain itu proses pengurusan yang agak ribet selain administrasi juga berbiaya hal inilah yang menjadi alasan belum didaftarkannya merek dagang yang dicantumkan pada hasil produksinya. Keterbatasan pengetahuan itu juga membuat para pengusaha salah mengartikan bahwa ketika pendaftaran izin usaha terkait maka telah memperoleh sertifikat izin usaha, dan secara otomatis mendapatkan jaminan bagi kepemilikan merek dalam sebuah usaha. Padahal izin usaha tidak berkaitan dengan status kepemilikan suatu merek, karena kepemilikan hak atas merek hanya diperoleh oleh pendaftar pertama merek. Dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tersebut maka peneliti tertarik mengangkat judul "**Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Pedagang Ikan Kering di Kota Bengkulu**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, Berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas tersebut akan dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum bagi pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti di atas, studi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab kurangnya tingkat kesadaran hukum bagi para pelaku usaha Ikan Kering di Kota Bengkulu.
2. Mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu dalam pembuatan merk dagang.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi secara akademisi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata Ekonomi tentang Hak Kekayaan Intelektual.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dalam kebijakan dan pembaharuan hukum perdata terutama pada tataran kebijakan dalam menentukan sikap terhadap hukum terutama Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual.

E. Kajian Penelitian

Penelitian yang berjudul "Kesadaran Hukum bagi Pelaku Usaha Pedagan Ikan Kering di Kota Bengkulu (Studi merek dagang) belum ada yang meneliti dan masih layak untuk di kaji/teliti. Akan tetapi ada beberapa penelitian/ hasil jurnal/artikel yang mirip terkait masalah kesadaran hukum dan faktor penyembanya, yaitu antara lain:

1. Tuti Haryanti, **Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim** (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di Batu Merah Kota Ambon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah makan Batu Merah tidak mengetahui dan memahami aturan berkaitan sertifikasi halal. Selain itu makna halal haram perspektif pelaku usaha telah mengalami reduksi makna. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum berimplikasi pada sikap/perilaku pelaku usaha yang cenderung tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan Batu Merah terhadap sertifikasi halal dinilai sangat rendah. Upaya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha melalui sosialisasi hukum, ceramah keagamaan. Dari jurnal tersebut jelas sangat berbeda dengan yang akan diliti yakni tentang kesadaran hukum bagi pelaku usaha pedagang ikan kering di Kota Bengkulu terkait merk dagang.

2. Fitri, Rahma (2015) *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Pengembangan Home Industry Di Kota Bengkulu*. Bengkoelen Justice, 4 (1). pp. 1109-1120. ISSN 2088-3412. Adapun hasil dan pembahasan penelitian ini bahwa Faktor-faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha dalam pendaftaran merek adalah dikarenakan a. Tingkat pelaku usaha mikro kecil yang masih kurang mengenai Hak Kekayaan Intelektual; b. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak sampai kepada pelaku usaha mikro dan kecil. c. Biaya pendaftaran merek yang cukup tinggi. Upaya peningkatan kesadaran hukum agar pelaku usaha sadar hukum dalam pendaftaran merek dapat dilakukan dengan mengubah pola pikir masyarakat, memberikan pelatihan secara insentif kepada pelaku usaha, memberikan pelayanan yang efektif. Dari hasil jurnal tersebut hampir sama dengan penelitian yang diteliti akan tetapi objek kajian yang diteliti terkait masalah ikan kering yang ada di Kota Bengkulu, yang mereka pahami bahwa ketika sudah ada izin usaha sudah termasuk ke merk dagang.
3. Amanda Putri Sukatmo, 2013. Hubungan tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga dalam Memenuhi Hak Konsumen di Kota Bogor (Studi Deskriptif tentang Kepatuhan Hukum terhadap UU No. 8 tahun 1999).

Adapun penelitian yang akan di bahas oleh peniliti ini yakni tentang Kesadaran Hukum bagi Pelaku Usaha Pedagang Ikan Kering di Kota Bengkulu

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹ Dalam penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta1994) Cetakan Kelima,hlm, 34

Disamping itu penelitian ini juga menggugakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan Produk Unofficial yang diperjualbelikan secara bebas yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Bengkulu, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah tempat mengabdikan peneliti.

4. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian yaitu setiap kelompok atau sentra pelaku usaha ikan kering yang ada di Kota Bengkulu.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang

²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung1995) hlm, 3

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.³

Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara melalui kepada pelaku usaha produk *ikan kering di Kota Bengkulu*, yaitu wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tidak terpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti, disamping itu informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan dan lainnya.

c. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

³Margono, S. *Metodologi Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000) hlm, 117

6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasanya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

7. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk penelitian.

G. Rencana Program/Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan,

Dr. Zulkarnain. S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

konsep teori, metode dan teknik penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, Bab ini membahas mengenai ruang lingkup pendampingan hukum bagi komunitas pedagang ikan kering.

Bab III, Bab ini deskripsi wilayah penelitian

Bab IV, beisikan pembahasan dan analisis penelitian.

Bab V, Bab ini berupa kesimpulan dan saran dari peneliti.

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “Kesadaran” dan “Hukum”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Kesadaran yaitu ingat akan dirinya; sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, kedua, undang-undang; peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb)⁴

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam V halaman 1525 di buku Amir Syaifuddin di jelaskan : sadar secara etimologi berarti: tahu, merasa dan mengerti. Dalam istilah fikih (yang membicarakan tentang hukum dalam arti kesadaran hukum) berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Dengan demikian, kesadaran hukum berarti merasa dan

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 359.

mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁵

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.⁶

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁷

⁵ Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Ciputat Press, Ciputat, 2002, hlm. 248.

⁶ Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 19.

⁷ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

Perihal kata atau pengertian kesadaran, di dalam kamus tercantum tidak kurang dari lima arti, yaitu⁸:

⁸ Webster dalam Soerjono Soekanto, 1982: 150

- a. Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state or fact.
- b. The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind.
- c. The totality of conscious states of an individual.
- d. The normal state of conscious life.
- e. The upper level of mental life as contrasted with unconscious processes.

Jadi kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kaminya.”⁹

Tentang istilah hukum perlu pula diberikan pengertian. Ini bukanlah merupakan suatu definisi, oleh karena sebagaimana dikatakan oleh Van Apeldorn dengan menyebut Kant, maka (Apeldoorn dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151):

“Wat Kant . . . schreef: ‘Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe vom Recht’, geldt nog altijd . . . Dit is althans ten dele te verklaren uit de veelzijdigheid . . . de grootsheid van het recht: het heeft zovele kanten . . . , dat men het niet op bevredigende wijze kan samenvatten onder een formule.”

⁹ Soerjono Soekanto, 1982: 150-151

Arti hukum dapat ditujukan pada cara-cara merealisasikan hukum tadi (Moedikdo dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151), dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat (Purbacaraka dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151); dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai kaedah
- c. Hukum sebagai tata hukum
- d. Hukum sebagai petugas hukum
- e. Hukum sebagai ketentuan dari penguasa
- f. Hukum sebagai proses pemerintahan
- g. Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- h. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Sekarang timbul masalah, apakah kesadaran hukum merupakan gabungan dari kedua pengertian yang telah diuraikan di atas? Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum sebagaimana dinyatakan oleh van Schmid, sebagai berikut (Schmid dalam Soerjono Soekanto, 1982: 151):

“Van rechtsgevoel dient men te preken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bik het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middeljik, door nadenken, redeneren en argumentatie aannemelijk gemaakt worden.”

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum
Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : pertama, preventif. Yaitu upaya pencegahan dengan pembinaan agar subjek hukum (pengusaha), khususnya pengusaha kecil mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kedua, represif yaitu pemidanaan.

2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut.

Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya (Soerjono Soekanto, 1982: 159). Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah (Kutschincky dalam Soerjono Soekanto, 1982: 159):

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior)

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Soerjono Soekanto, 1982: 159).

Sedangkan Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan hukum
Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara

yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut

b. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud (Zainuddin Ali, 2007: 67).

c. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- 5) Kepentingannya terjamin

d. Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

e. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.¹⁰

3. Elemen Kesadaran Hukum

Elemen Kesadaran Hukum Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-

¹⁰ Zainuddin Ali, 2007: 69-50

pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut:¹¹

- a. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
- b. Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengah-an). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan

¹¹ Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80

- c. Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya
- d. Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum. Disini jelas terlihat bahwa hukum masyarakat primitif merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya. Kemudian ketika berkembang paham scholastic yang dipercaya bahwa hukum berasal dari titah Tuhan (abad pertengahan) dan berkembang mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), mengultuskan rasio manusia eksistensi dan peranan kesadaran, sangat kecil dalam hal ini, kesadaran hukum tidak penting lagi bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab suci (mazhab scholastic) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan rasionya (mazhab hukum alam moderen).

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
 - b. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
 - c. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
 - d. Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.
4. Hubungan antara Kesadaran Hukum dan Kepatuhan
- Hukum Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha pembangunan.

Sejak awal pemerintahan Orde Baru (Orba) secara jelas dan sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV /MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakan Hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan di bidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
- b. Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaannya.
- c. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian umum.
- d. Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan

- e. Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan
- f. Meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat menghayati hak dan kewajibannya
- g. Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum tertentu. Melalui hukum inilah antara lain ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan maupun beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakcocokan antara apa yang diharapkan oleh hukum dan tingkah laku nyata warga masyarakat.

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap

warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai satu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari suatu sistem yang besar yaitu masyarakat atau lingkungannya.

Paksaan (coercion, threat) merupakan ciri hukum yang menonjol, tetapi penggunaannya menjadi makin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara moderen. Negara moderen menciptakan mesin kekuasaan khusus untuk membuat hukum dan menyiapkan pula kelengkapan untuk

mendukungnya, seperti polisi, jaksa, dan system peradilan pada umumnya., Sejak awal tidak ada kesepakatan yang jelas tentang konsepsi kesadaran hukum, juga dipertanyakan apakah kesadaran hukum sama dengan perasaan hukum. J.J. Von Schmid (1965) memberikan ulasan tentang perasaan hukum, yaitu bahwa penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat.

Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran secara ilmiah. Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana

hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.¹²

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penelitian menghadapkan rakyat yang didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif.¹³ Perspektif instrumental mengatakan, kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan adanya hukuman. Maka meningkatkan berat sanksi dianggap cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normatif berhubungan

¹² Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.

¹³ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 208

dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhi, kendatipun mengorbankan kepentingannya. Rakyat juga menjunjung suatu pemerintahan, apabila diyakini bahwa pemerintahan itu memiliki hak moral untuk mengatur rakyatnya.

B. Teori Perlindungan Hukum

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.¹⁴ Menurut Hans Kelsen keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan dalam artian legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2006, hlm 159.

suatu tatanan hukum positif melainkan dengan penerapannya.¹⁵

Keberadaan hukum dalam masyarakat juga merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lain dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁶

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 17.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum: suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, hlm 39.

hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

C. Teori Perlindungan Hak Kekayaan intelektual

Perkembangan teori yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seiring dengan adanya kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sektor penggunaan Hak Kekayaan Intelektual diantaranya kebutuhan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di Pengadilan ataupun dalam hal perjanjian perdagangan Internasional, kemudian agar pengaturan hak-hak yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual selalu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga cakupan HKI diperluas meliputi penggunaan-penggunaan baru.¹⁷

Terdapat beberapa teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI antara lain :

- a. Teori Hak Alami
- b. Teori Karya
- c. Teori Pertukaran Sosial
- d. Teori Fungsional

Teori-teori ini menjelaskan bahwa kepemilikan atas HKI termasuk dalam Hak Asasi Manusia sebagai Individu yang berpola pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus

¹⁷ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.1

diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan terhadap Individu yang telah menghasilkan karya, sehingga HKI dalam teori-teori diatas memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain.

D. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut. Pengalaman masyarakat miskin ketika mengakses bantuan hukum itulah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pengacara kepada masyarakat miskin melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum

untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).¹⁸

Kemiskinan telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak hanya secara ekonomis tetapi juga secara hukum dan politik. Seorang kaya yang biasanya akrab dengan kekuasaan dapat menerjemahkan keadilan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakadilan. Bagi masyarakat miskin kebutuhan mendapatkan keadilan tidak dengan mudah mereka dapatkan karena kemiskinannya karena itulah mereka membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka tersebut. Namun, sayangnya masyarakat miskin tidak begitu saja mendapatkan bantuan dari masalah hukum yang dihadapinya, berbeda dengan masyarakat kaya yang dengan kekayaannya dapat membuat hukum dekat dengannya.

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses

¹⁸ Pujiono, *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar “*Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*”, Semarang , 09 Pebruari 2010

bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.¹⁹ Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.²⁰ Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Masalah hukum bagi masyarakat miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi di negara-negara yang mana masyarakat menderita kemiskinan secara struktural, masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara atau para pemilik

¹⁹ Justice for The Poor – The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005, hal 85

²⁰ Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi*, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, (akarta: LBH Jakarta, 2007, hal vi.

modal.²¹ Masyarakat miskin karena memang dibuat miskin, bukan dilahirkan miskin. Kesempatan untuk menjadi seimbang tidak pernah ada sehingga bantuan hukum yang diberikan kepada mereka harus juga melihat kepada posisi mereka ini. Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengusung Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang ditujukan selain untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berkusus juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.²²

²¹ Justice for The Poor, *op.cit*

²² Adnan Buyung Nasution, *Pengantar Bantuan Hukum*, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *op.cit*

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bengkulu

Secara historis Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Kota Kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedadatan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Propinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibukotanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan

wilayah *Kedatukan* dihapus dan *Kepemangkuhan* menjadi kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 14.452 km² dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa.

Secara geografis, Kota Bengkulu terletak pada koordinat 30°45' – 30°59' Lintang Selatan dan 102°14' – 102°22' Bujur Timur. Posisi geografis tersebut terletak di pantai bagian Barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Bengkulu mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan rezim energi (gelombang) kuat, yang dipengaruhi oleh *swell* dan diperkirakan menimbulkan erosi alami pantai akibat gelombang besar tersebut. Erosi alami pantai atau abrasi pantai ini berpotensi untuk menimbulkan sedimen pada garis pantai dan hal ini akan diperparah oleh suplai sedimen dari das besar yang terletak di sekitar Kota Bengkulu. Kondisi ini perlu dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus

diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan.

Secara administratif, Kota Bengkulu mempunyai luas wilayah sekitar 14.452 km², yang terdiri dari 9 kecamatan (pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Singaran Pati dari kecamatan induk, yaitu Kecamatan Gading Cempaka) dan 66 kelurahan, dengan batas administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
3. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Sebelah Barat berbatasan Samudera Hindia.

Untuk lebih jelasnya, letak geografis Kota Bengkulu dan administratif Kota Bengkulu dapat dilihat pada **Tabel 1.1** berikut ini:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kota Bengkulu Menurut Kecamatan
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Kec. Selebar	34,68	24
2	Kec. Kampung Melayu	40,65	28
3	Kec. Gading Cempaka	8,398	6
4	Kec. Singaran Pati *	1,442	1
5	Kec. Ratu Agung	8,78	6
6	Kec. Ratu Samban	9,93	7
7	Kec. Teluk Segara	7,35	5
8	Kec. Sungai Serut	9,33	6
9	Kec. Muara Bangkahulu	23,96	17
Jumlah		144,52	100

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2009, BPS Kota Bengkulu.

Ket : * Pemekaran dari Kec. Gading Cempaka

1. Topografi

a. Ketinggian

Kota Bengkulu terletak pada ketinggian antara 0 – 100 m/dpl, dengan persebaran sporadis pada setiap wilayah kota, sehingga menyebabkan morfologi kota yang bergelombang. Lokasi dengan titik tertinggi (hingga 100 m/dpl) berada di bagian tenggara (Kec. Selebar). Sementara titik terendah (antara 0 m/dpl – 10 m/dpl) di bagian Selatan, Utara dan Timur, sedangkan Pusat Kota Bengkulu sendiri berada pada ketinggian antara 10 – 25 m/dpl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Peta 1.3** berikut ini.

b. Kemiringan

Secara umum wilayah Kota Bengkulu didominasi oleh kelas lereng datar, yang mencapai 88,09% (12.730,7 Ha), yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lerengnya 0 – 3% dengan luas 8.145,38 Ha dan sekitar 4.585,32 Ha kemiringan lereng 3 – 8% yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota.

Wilayah dengan kemiringan 0 – 3% ini terletak di daerah bagian Barat, Selatan dan Timur Laut Kota Bengkulu, sedangkan kemiringan lereng 3 – 8% sebagian di Utara, pusat kota yang memanjang ke arah Tenggara Kota Bengkulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Peta 1.4** berikut ini.

Tabel 1.2
Kemiringan / Lereng Kota Bengkulu

Nilai Kemiringan	Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
0 - 3 %	Datar	8.145,38	56,36
3 - 8 %	Agak Landai	4.585,32	31,72
8 - 15 %	Landai	1.705,19	11,79
15 - 40 %	Agak Curam	16,11	0,11
Jumlah		144.520	100

Sumber : Hasil Perhitungan Aplikasi ARCGIS, Tahun 2008

c. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi iklim, daerah ini tergolong tipe iklim A (Tropis Basah) dengan kelembaban 70 – 87%. Jumlah bulan basah 10 bulan, yakni pada bulan Oktober - Juli. Temperatur rata-rata tahunan antara 25° - 27°C dengan curah hujan bulanan berkisar 230 - 620 mm, dengan jumlah hari hujan berkisar antara 10 - 23 hari.

Dr. Zulkarnain, S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

Suhu udara maksimum berkisar antara 29,6⁰C – 31,5⁰C dan suhu minimum berkisar antara 23,1⁰C – 24,2⁰C dengan curah hujan rata-rata 2.626 mm/ tahun dan rata-rata hari hujan sekitar 188 hari/tahun. Curah hujan tahunan berkisar 2.500 – 4.000 mm. Kecepatan angin rata-rata 18 knot atau sekitar 10 km/jam, tekanan udara berkisar antara 1.008,4 – 1.012,6 MB dan kecepatan angin maksimum berkisar 14 - 32 mil/jam. Lama penyinaran matahari rata - rata berkisar antara 55 – 86%.

Untuk lebih jelasnya beberapa informasi klimatologi Kota Bengkulu pada tahun 2009, dapat dilihat pada **Tabel 1.3** berikut ini :

Tabel 1.3
Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, Suhu Udara,
Kelembaban Kota Bengkulu

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu Udara			Kelembaban Udara (%)
				Maks. (°C)	Min. (°C)	Rata-rata (°C)	
1	Januari	450	23	29,8	23,4	26,0	85
2	Februari	237	23	29,9	23,4	26,2	83
3	Maret	323	21	30,8	23,5	26,5	84

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu Udara			Kelas Udara (%)
				Maks. (°C)	Min. (°C)	Rata-rata (°C)	
4	April	572	19	31,1	23,9	26,8	81
5	Mei	198	16	31,0	23,6	26,8	83
6	Juni	297	16	31,3	23,8	26,1	91
7	Juli	248	12	31,7	23,1	26,5	82
8	Agustus	178	14	31,2	23,1	26,5	81
9	September	211	16	31,0	23,4	26,8	83
10	Oktober	334	24	31,1	23,1	26,6	85
11	November	459	23	30,5	24,0	26,6	85
12	Desember	345	23	30,7	24,0	26,6	86

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2009, BPS Kota Bengkulu

d. Geologi

1). Geologi Umum

Secara umum bagian tengah Peta Geologi Lembar Bengkulu dan sekitarnya (S. Gafoer, T. C. Amin dan R. Pardede, 1992.) skala 1: 250.000, ditempati oleh beberapa gunung api muda, antara lain Bukit Dingin

dengan ketinggian mencapai 2.020 m di atas permukaan laut (dpl), Bukit Balai (1.683 m dpl), Bukit Condong (2.079 m dpl), Bukit Daun (2.467 m dpl), Gunung Hulupalik (2.493 m dpl), dan Bukit Gendahululai (2.130 m dpl). Gunung-gunung tersebut membentuk jajaran gunungapi strato sebagai bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan dengan arah umum Barat Laut – Tenggara. Di bagian Barat dan Timur dibatasi oleh perbukitan bergelombang, setempat dengan timbulan tajam terdapat di bagian Utara dan Selatan. Dataran sempit terdapat setempat-setempat di daerah pantai pada bagian Barat Daya.

Sesar Sumatera dengan arah umum Barat Laut - Tenggara memotong batuan berumur Oligosen sampai Kuartar. Di beberapa tempat terlihat bahwa sesar Sumatera merupakan kontak antara batuan vulkanik Kuartar dengan batuan padu berumur lebih tua. Dataran sempit yang dijumpai setempat-setempat di bagian Barat Daya menurut Ratman dkk. (1978) dibentuk oleh material lepas berukuran lempung sampai kerikil dengan ketebalan kurang dari 5 m.

2). Geologi Wilayah

Dijelaskan pada Peta Geologi Lembar Bengkulu dan sekitarnya (S. Gafoer, T. C. Amin dan R. Pardede, 1992.) skala 1: 250.000, bahwa wilayah Kota Bengkulu secara umum tersusun oleh batuan endapan permukaan (*surficial deposits*) berumur Kuartar dan

batuan sedimen dan gunung api (*sedimentary and volcanic rocks*) serta batuan terobosan berumur Tersier.

Urutan stratigrafi dari satuan termuda sampai yang tertua adalah sebagai berikut :

1. **Undak Aluvium (Qat)**

Satuan ini merupakan endapan permukaan yang termuda, berumur Holosen Kuartar yang tersusun oleh pasir, lanau, lempung dan kerikil yang dibentuk oleh endapan sungai, pantai dan rawa. Endapan ini penyebarannya hampir di seluruh Kota Bengkulu, mulai dari bagian Utara hingga bagian Selatan, namun tidak mencapai batas kota di sebelah Timur, dengan luas sekitar 62,8%.

2. **Aluvium (Qa)**

Satuan ini juga berumur Holosen Kuartar yang tersusun oleh bongkah, kerikil, pasir, lempung, lanau dan lumpur. Endapan permukaan ini penyebarannya hanya pada sebagian wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Gading Cempaka (seluruh kawasan Danau Dendam Tak Sudah), dengan luasan berkisar sekitar 15%.

3. **Endapan Rawa (Qs)**

Endapan permukaan yang berumur Holosen Kuartar ini tersusun oleh pasir, lanau dan lumpur dengan sisa tumbuhan. Penyebarannya hanya terdapat pada bagian Utara Kecamatan

Muara Bangkahulu dan sebelah Timur Kecamatan Gading Cempaka, dengan luas total sekitar 3%.

4. **Batu Gamping Terumbu Karang (QI)**

Endapan permukaan yang berumur Plistosen Kuartar ini tersusun oleh batu gamping terumbu. Penyebarannya sporadis pada beberapa kecamatan, umumnya berbatasan langsung dengan laut, yaitu Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Ratu Agung.

5. **Formasi Bintuhan (QTb)**

Satuan batuan ini merupakan batuan sedimen dan gunung api yang diduga berumur Plistosen Kuartar dan tersusun oleh konglomerat aneka bahan, breksi, batu gamping terumbu, batu lempung tufan, berbatuapung, kayu terkesikan. Umumnya terdapat di bagian Timur Kecamatan Muara Bangkahulu.

6. **Andesit (Tpan)**

Andesit merupakan batuan terobosan, yang diduga berumur Pliosen Tersier. Penyebarannya di Kota Bengkulu umumnya berada di Kecamatan Selebar

e. Struktur Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bengkulu dan sekitarnya (S. Gafoer, T.C. Amin dan R. Pardede, 1992.) dengan skala 1: 250.000, struktur geologi yang terdapat di Kota Bengkulu adalah

kelurusan, dengan sumbu Barat Laut Tenggara yang terdapat di Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu.

Struktur geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera dan bagian dari sesar Musi Keruh dan Sesar Ketaun, yang bagian dari Sesar Semangko. Struktur geologi dengan skala regional misalnya Sesar Semangko yang relatif berarah Barat Laut – Tenggara atau relatif searah dengan Pulau Sumatera dapat berfungsi sebagai pemicu terjadinya gempa di sepanjang/di sekitar zona sesar tersebut.

f. HIDROGeologi

1. Air Permukaan

Air permukaan yang terdapat di Kota Bengkulu dapat ditemukenali dari informasi Satuan Wilayah Sungai/Wilayah Sungai (SWS/WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pentingnya informasi mengenai SWS/WS dan DAS, karena masing-masing WS umumnya mempunyai karakteristik berbeda, demikian juga dengan DAS yang diharapkan dapat memberikan gambaran potensi sungai sampai orde yang terkecil.

Dalam pengelompokan Satuan Wilayah Sungai (SWS), sungai-sungai di wilayah Kota Bengkulu termasuk dalam SWS 01.28 (Kanal-Alas-Talo), yang mempunyai 35 sungai, dengan luas Daerah Pengaliran

Sungai (DPS) sekitar 6.884,3 km². Adapun sungai yang melintasi Kota Bengkulu antara lain Air Bengkulu, Air Jenggalu, Air Hitam, Air Babatan, Air Betungan, Air Muara, Air Riak, Air Lempuing dan Air Sepan. Selain sungai, di Kota Bengkulu terdapat Danau Dendam Tak Sudah dengan luas genangan sekitar 70 ha. Danau ini merupakan sumber air irigasi dengan areal sawah seluas 510 ha (sebelum alih fungsi).

Air permukaan yang terdapat di Kota Bengkulu dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi penduduk Kota Bengkulu oleh PDAM. Salah-satunya adalah IPA Surabaya yang memanfaatkan Air Bengkulu sebagai sumber air baku. Selain IPA Surabaya, pemanfaatan sumber air baku oleh PDAM adalah Air Jenggalu, dengan IPA Nelas, yang terletak di Kabupaten Seluma. Dari kedua IPA tersebut mempunyai kapasitas terpasang dan kapasitas produksi sebesar 650 lt./detik.

2. Air Tanah

Potensi air tanah dangkal di Kota Bengkulu berupa sumur dan mata air. Penggunaan sumur sebagai sumber air baku oleh penduduk digunakan hampir merata di seluruh wilayah kota. Kedalaman sumur untuk mendapatkan air adalah sekitar 10-15 m. Adapun sumber mata air di Kota Bengkulu terdapat di

beberapa lokasi, yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Potensi air tanah dalam Kota Bengkulu berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bengkulu, skala 1 : 250.000 dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan litologi batuan dan kelulusannya, Kota Bengkulu berada pada 2 (dua) jenis litologi, yaitu :
 - a. Aluvium, yang terdiri dari kerikil, pasir dan lempung, dengan kelulusan sedang sampai tinggi pada material kasar dan berkelulusan rendah pada material lempungan;
 - b. Napal, tufa napalan dan tufa lempungan, dengan kelulusan, yang umumnya rendah sampai dengan sangat rendah.
2. Berdasarkan ketersediaan air tanah dan produktifitas akuifer, Kota Bengkulu termasuk ke dalam akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktifitas rendah dan daerah air tanah yang langka. Kondisi ini berlaku di seluruh Kota Bengkulu.
3. Daerah air tanah jelek, yang terdapat pada bagian selatan Kec. Kampung Melayu.

Akuifer dangkal di wilayah dataran umumnya kurang produktif menilik litologi akuifernya bersifat

lempungan dan tidak menerus, serta pelamparan vertikalnya yang tipis. Menurut Siddik dkk. (1977) mata air di sekitar Pondok Kelapa menghasilkan debit kurang dari 10 l/dtk. Pemboran di Stasiun Relay TVRI Bengkulu menunjukkan adanya akuifer dalam berupa batupasir lempungan pada kedalaman 42-60 m dari muka tanah setempat, bertekanan negatif dan kecil potensinya. Purbo-Hadiwidjojo dan Tjahjadi (1981) menyatakan bahwa akuifer terpenting di sekitar Kota Bengkulu adalah batupasir dengan kedalaman akuifer bervariasi, debit diperkirakan kurang dari 2 l/dtk.

Beberapa pemboran di Padang Harapan dan Pekan Sabtu pada jarak kurang 5 km dan 12,5 km ke arah tenggara dari pusat Kota Bengkulu, serta di lokasi Bentiring pada jarak lebih kurang 15 km ke arah Timur Laut dari pusat Kota Bengkulu menembus akuifer batupasir, setempat dengan campuran fragmen batuan. Ketebalan bervariasi antara 3 hingga 64 m (PT. Rayakonsult, 1984).

Potensi Air di Kota Bengkulu sangat melimpah, dan bisa dilihat dari banyaknya aliran sungai yang melintasi daerah ini. Dalam pengelompokan Satuan Wilayah Sungai (SWS), sungai-sungai di wilayah Kota Bengkulu termasuk dalam SWS 01.28 (Nasal – Alas - Talo).

g. Vegetasi

Kondisi vegetasi yang ada di Kota Bengkulu terdiri dari vegetasi alamiah dan vegetasi hasil budidaya. Umumnya vegetasi dipengaruhi oleh kondisi fisik alam, seperti iklim, jenis tanah, hidrologi, dan lainnya yang biasanya dikelompokkan dalam satuan penggunaan lahan. Selain itu vegetasi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada, seperti dataran tinggi, pesisir pantai, pulau karang, dan lainnya.

Vegetasi alamiah yang terjadi tanpa campur tangan manusia (hasil budidaya) sebagian besar berada di kawasan hutan lindung, wilayah Kota Bengkulu. Vegetasi ini umumnya berupa tanaman keras jenis kayu-kayuan seperti jati, mahoni, gaharu, kulim, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat vegetasi yang berupa tanaman buah-buahan, seperti durian, cempedak, petai, dan lain-lain yang tumbuh secara alamiah.

Umumnya vegetasi produktif berupa tanaman padi dan tanaman kebun campuran. Selain itu juga terdapat tanaman keras seperti tanaman karet yang tadinya merupakan vegetasi alamiah namun sebagian besar sudah dibudidayakan sebagai tanaman produktif.

h. Bencana

Indonesia merupakan kepulauan yang terletak diantara pertemuan Lempeng Eurasia dan Australia yang selalu bergerak. Oleh karena itu Kepulauan Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami dan

Dr. Zulkarnain. S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

letusan gunung api Berdasarkan penelitian geologi diketahui bahwa potensi episentrum gempa bumi tersebar di sepanjang Pantai Barat Pulau Sumatera yang merupakan zona subduksi antara lempeng Eurasia dan Australia. Selain itu, di sepanjang Pulau Sumatera terdapat sebaran gunung api aktif Bur Ni Telong, Puet Sague, dan Sorik Marapi, serta Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh sampai Lampung.

Berdasarkan Peta Bahaya Guncangan Gempa Bumi Indonesia (Kertapati, 1999), percepatan gempa bumi dengan periode ulang 500 tahunan atau 90% tidak akan terlewatkan dalam 50 tahun. Daerah ini termasuk pada wilayah pusat gempa bumi merusak dengan kedalaman dangkal hingga menengah (0-150 km) bagian Barat Sumatera, zona antara 0,25 - 0,35 g dengan besaran gempa > 5,6 Skala *Richter* (SR). Dengan menggunakan Skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI), pantai pesisir Bengkulu termasuk pada zona kategori nilai intensitas V hingga IX.

Tabel 1.4

Skala Modified Mercalli Intensity (MMI)

Skala	Keterangan
I	Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh orang tertentu saja

Skala	Keterangan
II	Getaran dirasakan orang tertentu, benda-benda ringan yang bergantung
III	Getaran dirasakan nyata di dalam, terasa seakan-akan truk lewat
IV	Pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah, di luar hanya oleh orang tertentu saja. Barang pecah belah, jendela, pintu gemerincing dinding berbunyi karena pecah-pecah
V	Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Barang pecah belah, jendela dan sebagainya pecah, barang-barang terpelanting pohon, tiang dan lain-lain tampak goyang, bandul lonceng jam dapat terhenti
VI	Getaran dirasakan oleh semua orang, kebanyakan terkejut dan lari keluar. Plaster dinding jatuh dan cerobong asap pabrik rusak ringan
VII	Semua orang ke luar rumah, kerusakan ringan pada rumah dan bangunan yang konstruksinya tidak baik maupun yang baik. Cerobong asap pecah atau retak-retak. Getaran dapat dirasakan oleh orang yang naik kendaraan
VIII	Kerusakan ringan pada bangunan-bangunan yang konstruksinya baik. Retak-retak pada bangunan-bangunan yang kuat. Dinding dapat lepas dari kerangka rumah, cerobong asap pabrik dan

Skala	Keterangan
	monument roboh, air menjadi keruh
IX	Kerusakan pada bangunan-bangunan yang rangkanya kuat, rumah menjadi tidak tegak (lurus). Banyak retakan pada bangunan-bangunan yang konstruksinya kuat, bangunan rumah bergeser dari pondasinya, pipa di dalam tanah putus
X	Bangunan-bangunan dari kayu kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah lengser di tebing dan di tanah yang curam. Terjadi gelombang pasang atau tsunami
XI	Hancur sama sekali. Gelombang gempa tampak pada permukaan tanah, pemandangan gelap, benda-benda terlempar ke udara

Peristiwa gempa yang pernah terjadi di Provinsi Bengkulu (Rahardiawan, 2000), yaitu pada 1963 - 1975 terjadi 3-16 kali gempa/tahun, 1984 sebanyak 2 kali, 1992 terjadi sebanyak 26 kali dan 1995 terjadi sebanyak 2 kali. Gempa-gempa tersebut sebagian besar menunjukkan mekanisme sesar naik, sedangkan sebagian lagi adalah sesar normal, mendatar *oblique* dan sesar mendatar. Arah kompresi maksimum umumnya Timur Laut - Barat Daya dan Barat Laut - Tenggara dengan dominasi sesar naik yang memiliki *magnitude* besar (>7).

Pemicu tsunami di Bengkulu adalah akibat gempa bumi yang terjadi di dasar laut pada zona busur muka patahan Mentawai dan zona seismik *Benioff*. Sejarah peristiwa bencana tsunami di Pantai Bengkulu (Rahardiawan, 2000) adalah : tahun 1777, 1833, 1861, 1906, 1931 dan 1958. Untuk memperkecil resiko serangan tsunami, dapat dibuat jalur hijau dari tanaman keras ± 200 m dari pantai, pelestarian hutan bakau, tidak dirusaknya terumbu karang dan pembuatan rumah bertiang.

i. Penggunaan Lahan

Komposisi antara lahan terbangun dan tidak terbangun hampir sama. Lahan terbangun seluas 45,87 km² (31,74%) dan sisanya merupakan lahan non terbangun, umumnya berupa kebun campuran dan semak belukar.

1. Lahan terbangun, dimanfaatkan sebagai lahan perumahan, perdagangan dan perkantoran. Perumahan (40,62 km²) umumnya tersebar merata di seluruh kecamatan, dan hanya sebagian kecil pada Kecamatan Kampung Melayu, sedangkan perdagangan dan perkantoran tersebar sporadis pada beberapa kecamatan yang lebih berorientasi pada pusat kota, yaitu Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu

- Samban dan Kecamatan Gading Cempaka, dengan luas keseluruhan sekitar 3,19 km².
2. Lahan non-terbangun masih cukup luas dan merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan pada masa mendatang. Jenis penggunaan lahan non-terbangun yang cukup mendominasi di Kota Bengkulu adalah kebun campuran seluas 20,41 km² dan semak belukar seluas 27,28 km². Kebun campuran dan semak belukar menyebar merata di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Ratu Samban.

Untuk lebih jelasnya, penggunaan lahan di Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel dan Peta 1.8 berikut ini :

Tabel 1.5
Penggunaan Lahan Kota Bengkulu, Tahun 2009

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
A.	Lahan Non-Terbangun		
1.	Belukar Rawa	3,20	2,21
2.	Cagar Alam	5,57	3,85

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
3.	Danau	0,56	0,39
4.	Hutan Pantai	1,13	0,78
5.	Kebun Campuran	20,41	14,12
6.	Lahan Terbuka	9,25	6,40
7.	Lapangan Golf	0,46	0,32
8.	Pemukaman	0,13	0,09
9.	Sawah	8,96	6,20
10.	Semak Belukar	27,28	18,87
11.	Sungai	1,65	1,14
12.	Taman Wisata Alam	9,28	6,42
13.	Tambak Ikan	10,61	7,34

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
14.	Tempat Wisata	0,17	0,12
Jumlah		98,66	68,26
B.	Lahan Terbangun		
1.	Asrama Haji	0,12	0,08
2.	Bandar Udara	1,47	1,02
3.	Pasar	0,08	0,06
4.	Pelabuhan	0,19	0,13
5.	Perdagangan	2,25	1,56
6.	Perkantoran	0,94	0,65
7.	Pertamina	0,04	0,03
8.	Perumahan	40,62	28,10

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
9.	Rumah Sakit	0,16	0,11
Jumlah		45,87	31,74
TOTAL		144.52	100,00

Sumber : BAPPEDA Kota Bengkulu, Tahun 2008.

B. Kependudukan

1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2009 berjumlah 278.831 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Gading Cempaka sebesar 76.008 jiwa dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Sigaran Pati yaitu 13.120 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.6** dan gambar pada grafik berikut

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kota Bengkulu, Tahun 2009

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Persentase(%)
1	Kec. Selebar	29.759	11 %

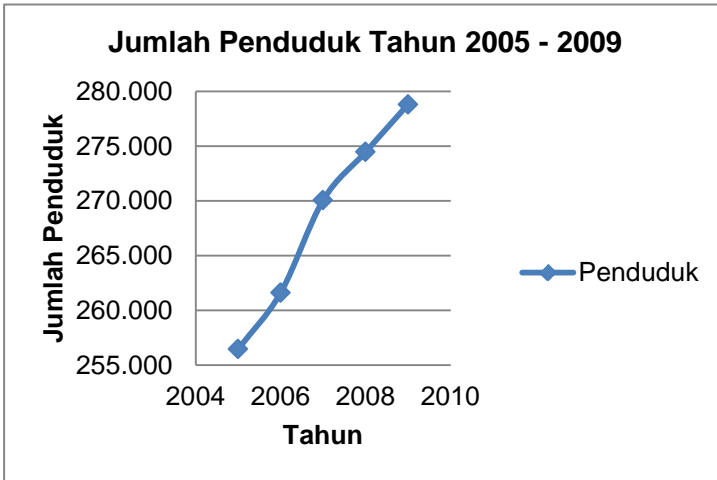
No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Persentase(%)
2	Kec. Kampung Melayu	21.507	8 %
3	Kec. Gading Cempaka	62.888	27 %
4	Kec. Singaran Pati*	13.120	-%
5	Kec. Ratu Agung	42.999	15 %
6	Kec. Ratu Samban	29.853	11 %
7	Kec. Teluk Segara	26.645	10 %
8	Kec. Sungai Serut	25.693	9 %
9	Kec. Muara Bangkahulu	26.367	9 %
Jumlah		278.831	100 %

*Ket : * Pemekaran dari Kec. Gading Cempaka*

Sumber : BPS Kota Bengkulu

Gambar 1.9

Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2005 – 2009



Tabel 1.7

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bengkulu, Tahun 2000 - 2009

Tahun	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan
2000	237.202	-
2001	279.753	17,94%
2002	304.188	8,73%
2003	255.584	-15,98%
2004	261.440	2,29%
2005	256.466	-1,14%
2006	261.620	1,22%
2007	270.079	3,23 %

Tahun	Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan
2008	274.477	1,63 %
2009	278.831	8,62 %

*Sumber : BPS Kota Bengkulu dan
BAPPEDA Kota Bengkulu*

2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

a. Distribusi Penduduk

Pola distribusi penduduk di Kota Bengkulu dicerminkan oleh besar kecilnya jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk yang terdistribusi pada setiap kecamatan. Seperti halnya yang terjadi pada kota - kota lainnya, bahwa penyebaran penduduk relatif dipengaruhi oleh kecenderungan penduduk terkonsentrasi pada tempat dimana akses terhadap fasilitas pelayanan kota dengan biaya transportasi yang rendah merupakan pilihan utama penduduk dalam menentukan tempat tinggal. Dalam hal ini, rendahnya nilai lahan tidak akan banyak memberikan daya tarik yang dapat mempengaruhi minat penduduk untuk bertempat tinggal di lokasi - lokasi yang relatif masih kosong, namun memiliki tingkat pelayanan prasarana dan sarana kota yang rendah.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2009 adalah sebesar 18 jiwa/Ha atau 1.838 jiwa/km² dan terdistribusi pada seluruh wilayah kecamatan. Tipikal penyebaran pusat - pusat permukiman yang dulunya berorientasi pada pusat kota dan pusat kegiatan, kini cenderung berkembang secara sporadis pada lapisan

kedua pusat pengembangan. Kondisi ini mengakibatkan, perkembangan penduduk pada wilayah - wilayah baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 1.7
Kepadatan Penduduk Kota Bengkulu Menurut
Kecamatan, Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kec. Selebar	34,68	29.759	858
2	Kec. Kampung Melayu	40,65	21.507	529
3	Kec. Gading Cempaka	8,398	62.888	905
4	Kec. Singaran Pati *	1,442	13.120	-
5	Kec. Ratu Agung	8,78	42.999	3.400
6	Kec. Ratu Samban	9,93	29.853	3.006
7	Kec. Teluk	7,35	26.645	3.625

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km ²
	Segara			
8	Kec. Sungai Serut	9,33	25.693	2.754
9	Kec. Muara Bangkahulu	23,96	26.367	1.100
Jumlah		144,52	278.831	1.838

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, BPS Kota Bengkulu

*Ket : * Pemekaran dari Kec. Gading Cempaka*

3. Struktur Penduduk

a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kajian penduduk menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar perbandingan antara jumlah penduduk laki - laki dengan jumlah penduduk perempuan, yang memiliki kaitan dengan angka kelahiran (pada perempuan usia produktif) dan potensi tenaga kerja.

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota
Bengkulu, Tahun 2009

No	Kecamatan	Laki – Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	Selebar	15.730	14.030	29.760
2	Kampung Melayu	12.590	8.920	21.510
3	Gading Cempaka	30.753	32.135	62.888
4	Kec. Singaran Pati *	6.417	6.705	13.122
5	Ratu Agung	22.170	20.820	42.990
6	Ratu Samban	15.062	14.230	29.292
7	Teluk Segara	13.350	13.290	26.640
8	Sungai Serut	13.500	12.200	25.700
9	Muara Bangkahulu	12.450	13.920	26.370
J u m l a h		142.022	136.250	278.831

Sumber : BPS Kota Bengkulu

*Ket : * Pemekaran dari Kec. Gading Cempaka*

b. Penduduk Menurut Agama

Kehidupan dan toleransi umat beragama di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan harmonis, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah dan perayaan hari-hari besar keagamaan pelaksanaannya berjalan lancar. Sebagian besar masyarakat Kota Bengkulu (menurut data Tahun 2009) menganut Agama Islam yaitu sebesar 96,54 %, Kristen Protestan 2 %, Khatolik 1,02 %, Hindu 0,14 % dan Budha 0,30 %.

Tabel 1.9

Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2009

No	Agama	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Islam	269.182	96,5
2	Katolik	2.844	1,02
3	Protestan	5.577	2,00
4	Hindu	390	0,14
5	Budha	836	0,30
Jumlah		278.830	100

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2006

c. Penduduk Menurut Kelompok Usia

• Kelompok Usia Produktif dan Non-Produktif

Struktur penduduk menurut kelompok umur pada Tahun 2009 menunjukkan bahwa kelompok umur antara 15 – 19 tahun mendominasi jumlah penduduk Kota Bengkulu (31.720 jiwa). Selanjutnya diikuti kelompok umur 20 – 24 tahun dan kelompok umur 5 – 9 masing - masing 29.340 jiwa dan 28.700 jiwa.

Tabel 1.10

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Bengkulu, Tahun 2009

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Ribu)
0 - 4	13390	9940	23330
5 - 9	15550	13150	28700
10 - 14	14380	12660	27040
15 - 19	15430	16290	31720
20 - 24	12960	16390	29350
25 - 29	13510	13791	27301
30 - 34	10530	9460	19990
35 - 39	9060	10300	19360
40 - 44	6720	9790	16510

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Ribu)
45 - 49	11440	8760	20200
50 - 54	6760	6180	12940
55 - 59	5700	3270	8970
60 - 64	2810	1900	4710
+ 65	4330	4380	8710
Jumlah	142,58	136,26	278.831

Sumber : BPS Kota Bengkulu

Dari komposisi penduduk menurut struktur umur, selain diketahui jumlah penduduk belum produktif, produktif, dan tidak produktif, juga dapat dihitung angka beban ketergantungan penduduk. Angka beban ketergantungan ini dihitung dengan cara perbandingan antara angka penduduk usia non-produktif dengan usia produktif (tenaga kerja). Tingginya potensi angkatan kerja yang ada dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Tingginya tingkat harapan hidup.
2. Banyaknya tenaga kerja pendatang dan akhirnya menetap menjadi penduduk setempat.
3. Banyaknya kesempatan kerja sektor industri, pertanian, dan perdagangan telah menarik minat penduduk pendatang usia produktif.

4. Kondisi Sosial Budaya

Sebagai ibukota Provinsi Bengkulu yang didatangi dari berbagai kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu dengan demikian bahasa yang dipakai di kota ini pada umumnya terdapat empat bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bengkulu, yakni : Bahasa Melayu, Bahasa Rejang, Bahasa Pekal, Bahasa Lembak. Penduduk Kota Bengkulu berasal dari tiga rumpun suku besar terdiri dari Suku Rejang, Suku Serawai, Suku Melayu.

Di bidang kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ritual keagamaan mayoritas penduduk yang beragama Islam secara kuantitatif cukup baik. Kesadaran di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antar umat beragama yang aman, damai dan saling menghargai cukup baik. Dengan pemeluk mayoritas umat Islam cukup memberikan warna dalam pembangunan di Kota Bengkulu.

Di samping itu, terdapat adat dan istiadat yang cukup akrab dengan masyarakat Bengkulu, di antaranya: Kain Basurek, merupakan kain bertuliskan huruf Arab Gundul. Kepercayaan masyarakat di Kota Bengkulu umumnya atau sebesar 97,6% lebih menganut agama Islam. Upacara adat juga banyak dilakukan masyarakat di Provinsi Bengkulu seperti, sunatan rasul, upacara adat perkawinan, upacara mencukur

rambut anak yang baru lahir. Salah-satu upacara tradisional adalah upacara “Tabot”, yaitu suatu perayaan tradisional yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Muharram setiap tahunnya, untuk memperingati gugurnya Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW oleh keluarga Yalid dari kaum Syiah, dalam peperangan di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Pada perayaan Tabot tersebut dilaksanakan berbagai pameran serta lomba ikan-ikan, telong-telong, serta kesenian lainnya yang diikuti oleh kelompok-kelompok kesenian yang ada di Provinsi Bengkulu, sehingga menjadikan ajang hiburan rakyat dan menjadi salah-satu kalender wisatawan tahunan.

Falsafah hidup masyarakat setempat, “*Sekundang-Setungguan, Seio-Sekato*”. Bagi masyarakat Bengkulu pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama yang sering kita dengar dengan bahasa pantun yaitu: “*ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*”. Selain itu, ada pula “*bulek aia dek pembuluh, bulek kato dek mufakat*”, artinya bersatu air dengan bambu, bersatunya pendapat dengan musyawarah.

Falsafah hidup ini mampu meningkatkan kerukunan dan kualitas membangun kerjasama di antara masyarakat Kota Bengkulu, sehingga ketika mereka berbaur masih tetap bisa bekerjasama meskipun yang berbeda suku dan bahasa. Hal ini terlihat di beberapa

instansi pemerintah maupun swasta mereka bisa saling bantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam tataran ilmu sosiologi kondisi masyarakat seperti ini, disebut masyarakat yang mempunyai modal sosial.

C. Perekonomian

Faktor kegiatan ekonomi menyangkut berbagai faktor yang mendukung proses produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, cara pengolahannya, bentuk badan hukum dan lain sebagainya mulai dari tingkat yang sederhana sampai tingkat yang lebih kompleks. Untuk keperluan pengolahan, penghitungan, analisis, penyajian dan klasifikasi 'pendapatan' regional, maka berbagai, macam kegiatan ekonomi tersebut perlu dikelompokkan ke dalam sektor - sektor sesuai dengan sifat dan jenis kegiatannya.

Penyusunan klasifikasi sektor untuk semua kegiatan ekonomi di Kota Bengkulu didasarkan pada *International Standard Industrial Classification* (ISIC) yang kemudian dimodifikasi menjadi Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Sektor dan sub-sektor untuk seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan KLUI sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian
 1. Sub - sektor Tanaman Bahan Makanan
 2. Sub - sektor Tanaman Perkebunan
 3. Sub - sektor Kehutanan

4. Sub - sektor Peternakan dan hasil-hasilnya.
5. Sub - sektor Perikanan
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian
 1. Sub - sektor Minyak, dan Gas Bumi
 2. Sub - sektor Pertambangan Tanpa Migas
 3. Sub - sektor Penggalian
- c. Sektor Industri Pengolahan
 1. Sub - sektor Industri Minyak dan Gas
 2. Sub - sektor Industri Tanpa Minyak dan Gas
- d. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum
 1. Sub - sektor Listrik
 2. Sub - sektor Gas Kota
 3. Sub - sektor Air Bersih
- e. Sektor Bangunan/Konstruksi
- f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
 1. Sub - sektor Perdagangan Besar dan Eceran
 2. Sub - sektor Perhotelan
 3. Sub - sektor Restoran
- g. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
 1. Sub - sektor Pengangkutan
 2. Sub - sektor Komunikasi
- h. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
 1. Sub - sektor Bank
 2. Sub - sektor Lembaga Keuangan Tanpa`Bank
 3. Sub - sektor Jasa Penunjang Keuangan
 4. Sub - sektor Sewa Bangunan
 5. Sub - sektor Jasa Perusahaan
- i. Sektor Jasa-Jasa
 1. Sub-sektor Jasa Pemerintahan
 2. Sub-sektor Jasa Swasta

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi adalah salah-satu indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi Kota Bengkulu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *out-put*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung, berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel - tabel berikut menggambarkan bahwa sejak empat tahun pasca krisis ekonomi 1998 atau kurun waktu 2004 - 2009 kinerja perekonomian Kota Bengkulu semakin membaik. PDRB Kota Bengkulu atas dasar konstan telah mencapai 1.998.432,64 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2004, PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga konstan telah mengalami perkembangan sebesar 494.531,64 juta rupiah. Meningkatnya kinerja perekonomian Kota Bengkulu pasca krisis ekonomi menunjukkan bahwa

pasca puncak krisis ekonomi kinerja faktor-faktor produksi yang terdapat di Kota Bengkulu dalam menghasilkan barang dan jasa telah relatif normal dan bahkan cenderung meningkat.

Tabel 1.11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu 2004 - 2009 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

N O	SEKTOR	2004	2005	2006	2007*	2008**	2009**
1.	<i>PERTANIAN</i>	89505	95346	102576,72	109762	114163	114111
	a. Tanaman Bahan Makanan	9150	9444	9805	10275	9902	10631
	b. Tanaman Perkebunan	138	152	163	176	185	196
	c. Peternakan	9591	9778	10445	11092	11764	12463
	d. Kehutanan	0	0	0	0	0	0
	e. Perikanan	70626	75972	82163,72	88219	92312	90821
2.	<i>PERTAMBAHAN & PENGALIAN</i>	9728	10207	10722	11442	11831	12498
	a. Minyak dan	0	0	0	0	0	0

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

N O	SEKTOR	2004	2005	2006	2007*	2008**	2009**
	Gas Bumi						
	b. Pertambangan Tanpa Migas	0	0	0	0	0	0
	c. Penggalian	9728	10207	10722	11442	11831	12498
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	69966	73514	77803	82593	86915	91030
	a. Industri Migas	0	0	0	0	0	0
	1) Pengilangan Minyak Bumi	0	0	0	0	0	0
	2) Gas Alam Cair	0	0	0	0	0	0
	b. Industri Tanpa Migas	69966	73514	77803	82593	86915	91030
	1) Makanan, Minuman dan Tembakau	35789	37929	40229	43004	45024	47438
	2) Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	672	695	725	761	793	844
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	2919	3043	3347	3571	3742	3892

N O	SEKTOR	2004	200 5	2006	2007*	2008 **	2009* **
	4) Kertas dan Barang Cetak	491	520	536	564	608	738
	5) Pupuk, Kimia dan Barang Dari Karet	2836 7	294 99	31045	32628	3459 3	35836
	6) Semen & Barang Galian Bukan Logam	570	616	640	687	721	786
	7) Logam Dasar Besi dan Baja	0	0	0	0	0	0
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	805	835	891	956	993	1032
	9) Barang Lainnya	353	377	390	422	441	464
4.	<i>LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH</i>	1162 6	131 73	13918	14976	1623 0	17850
	a. Listrik	1927	212 9	2323	2510	2752	2983
	b. Gas Kota	0	0	0	0	0	0
	c. Air Bersih	9699	110 44	11595	12466	1347 8	14867
5.	<i>B A N G U N</i>	5856	610	64380	68506	7205	78412

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

N O	SEKTOR	2004	2005	2006	2007*	2008**	2009**
	<i>A N</i>	2	45			4	
6.	<i>PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</i>	543565	571434	613355	660559	680892	706394
	a. Perdagangan Besar & Eceran	515738	542505	583029	628505	646935	669823
	b. Perhotelan	3812	3943	4164	4401	4639	5029
	c. Restoran	24015	24986	26162	27653	29318	31542
7.	<i>PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</i>	263205	282381	297471,94	312974,39	327658,1	341591,19
	a. Pengangkutan	247543	265711	279385,94	293142,39	305661,1	317556,19
	1) Angkutan Rel	0	0	0	0	0	0
	2) Angkutan Jalan Raya	119873	128899	136210	142343	148489	154463
	3) Angkutan Laut	98633	104847	108728	113620	118262	122813,9
	4) Angkutan Sungai, Danau &	4229	4480	4716	5008	5217	5392

N O	SEKTOR	2004	200 5	2006	2007*	2008 **	2009* **
	Penyeberangan						
	5) Angkutan Udara/Penerbangan	1463 0	164 75	17902 ,94	19680 ,39	2066 4,1	21013 ,29
	6) Jasa Penunjang Angkutan	1017 8	110 10	11829	12491	1302 9	13874
	b. Komunikasi	1566 2	166 70	18086	19832	2199 7	24035
	1) Pos dan Telekomunikasi	1439 4	153 32	16652	18291	2031 9	22163
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	1268	133 8	1434	1541	1678	1872
8.	<i>KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSHN</i>	1432 71	149 973	15789 9	16755 3	1756 08	18234 0
	a. B a n k	4945 7	510 52	54051	57245	5958 1	62472
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank (Asrs+Non KUD)	3105 7	329 05	34015	35783	3692 1	37642
	c. Jasa Penunjang Keuangan	0	0	0	0	0	0

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

N O	SEKTOR	2004	200 5	2006	2007*	2008 **	2009* **
	d. Sewa Bangunan	3461 7	363 03	38310	40953	4339 2	45935
	e. Jasa Perusahaan	2814 0	297 13	31523	33572	3571 4	36291
9.	JASA-JASA	3144 73	331 987	35652 9	37902 3	4128 39	45420 6,45
	a. Pemerintahan Umum	1975 25	205 296	21914 3	23251 2	2593 46	28764 2
	1) Adm. Pemerintahan & Pertahanan	1975 25	205 296	21914 3	23251 2	2593 46	28764 2
	2) Jasa Pemerintahan Lainnya	0	0	0	0	0	0
	b. S w a s t a	1169 48	126 691	13738 6	14651 1	1534 93	16656 4,45
	1) Sosial Kemasyarakatan	2687 8	292 57	31868	34328	3619 5	37942
	2) Hiburan dan Rekreasi	7775	830 0	8925	9478	9934	10362
	3) Perorangan dan Rumah Tangga	8229 5	891 34	96593	10270 5	1073 64	11826 0,45
	P D R B	1503 901	158 906	16946 54,7	18073 88,39	1898 190,1	19984 32,64

N O	SEKTOR	2004	200 5	2006	2007*	2008 **	2009* **
			0				

*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Sangat Sangat Sementara*

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2006/2007, BPS Kota Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada tahun 2009 didorong oleh pertumbuhan seluruh sektor-sektornya. Dari 9 sektor penyumbang PDRB Kota Bengkulu tercatat 3 sektor di antaranya memegang andil yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor Perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa. Dari tiga sektor tersebut pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 706.394 juta rupiah, yang kedua sektor jasa sebesar 454.206 juta rupiah dan ketiga sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 341.951 juta rupiah.

Sebagai pusat perdagangan di Provinsi Bengkulu, kinerja sektor per-dagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor paling dominan dalam PDRB Kota Bengkulu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Kota Bengkulu relatif membaik, namun belum begitu menggeliat, kalau kita lihat dari pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Idealnya sebagai pusat perdagangan di Provinsi Bengkulu pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran di atas pertumbuhan sektor pertanian Kota Bengkulu. Apabila dibandingkan dengan tahun 2005 pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,13%.

Sementara itu sub sektor penggalian, sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang diharapkan menjadi sektor-sektor penggerak roda perekonomian Kota Bengkulu bersama-sama dengan sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor Industri, pertumbuhannya juga tidak optimal.

b. Struktur Perekonomian Kota Bengkulu

Kota Bengkulu adalah pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan jasa di Provinsi Bengkulu. Hal itu erat kaitan dengan kedudukan Kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi Bengkulu. Dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu, peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sangat dominan. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal Nilai nominal PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2009 sebesar 1.998.432,64 triliun rupiah.

Dr. Zulkarnain. S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

Setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran struktur perekonomian Kota Bengkulu di posisi berikutnya adalah sektor jasa - jasa. Pada tahun 2009 kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 454.206 juta rupiah. Posisi berikutnya pada struktur perekonomian Kota Bengkulu adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi sektor pengangkutan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2006 sebesar 341.951 juta rupiah. Sektor lainnya yang kontribusinya cukup besar dalam perekonomian Kota Bengkulu adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

c. PDRB per-Kapita Kota Bengkulu

Seiring dengan meningkatnya kinerja PDRB Kota Bengkulu pada kurun waktu 2004 - 2009 tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Bengkulu pada kurun waktu yang sama juga relatif meningkat. Kondisi itu terlihat dari peningkatan nilai nominal pendapatan per-kapita maupun nilai riil pendapatan per - kapita penduduk di Kota Bengkulu.

Tabel 1.12
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu
Tahun 2004 - 2009 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No	Sektor	2004	2005	2006	2007*	2008**	2009***
1.	Pertanian	6,92	7,02	7,02	6,97	7,11	7,02
2.	Pertambangan & Penggalian	0,64	0,65	0,66	0,65	0,65	0,65
3.	Industri Pengolahan	4,35	4,45	4,49	4,47	4,53	4,54
4.	Listrik Gas Dan Air Bersih	0,77	0,74	0,73	0,71	0,69	0,71
5.	Bangunan	3,30	3,30	3,27	3,28	3,33	3,48
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran	37,74	37,63	37,88	38,17	36,91	36,69
7.	Pengangkutan Dan	16,43	17,59	17,39	17,08	17,12	16,78

Dr. Zulkarnain. S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

No	Sektor	2004	2005	2006	2007*	2008**	2009***
	Komunikasi						
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Persahaan	9,11	8,68	8,49	8,38	8,36	8,13
9.	Jasa-Jasa	20,74	19,94	20,07	20,29	21,29	22,00
PDRB		100	100	100	100	100	100

*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Sangat Sementara*

Sumber Sangat : Kota Bengkulu Dalam Angka 2006/2007, BPS Kota Bengkulu

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, maka ditinjau dari nilai nominal maupun nilai riil pendapatan per-kapitanya tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Bengkulu jauh lebih baik.

d. Pendapatan Daerah

Pada tahun anggaran 2009 realisasi penerimaan pemerintah Kota Bengkulu mencapai 449,679 Milyar Rupiah. Penerimaan Pemda Kota Bengkulu terutama bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Jumlah penerimaan dari PAD sebesar 29,528 Milyar rupiah atau sebesar 6,56% dari total penerimaan, sedangkan penerimaan dari DAU mencapai 335,328 Milyar Rupiah atau sebesar 74,57% dari total penerimaan daerah. Dibandingkan tahun 2007 maka penerimaan Pemda Kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 11,02%.

Realisasi pengeluaran pemda Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2009 sebesar 456,560 Milyar rupiah. Pengeluaran yang terbesar adalah untuk belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi sebesar 309,180 milyar rupiah atau sebesar 67,72% dan belanja modal sebesar 112,180 milyar rupiah atau sebesar 24,57%. Dibandingkan tahun 2007 maka pengeluaran Pemda Kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 14,00%.

e. Sumber Daya Ekonomi

Untuk mewujudkan dan mempercepat pembangunan daerah, sehingga Kota Bengkulu dapat menjadi ibukota provinsi yang maju seperti daerah-daerah kota lainnya, maka keberadaan dan kelengkapan sarana dan prasarana ekonomi (sumberdaya ekonomi) menjadi penting untuk mendapat perhatian serius Kota di dalam mempersiapkan proses percepatan

pembangunan. Berikut gambaran sarana industri yang ada di Kota Bengkulu

Industri

Pada tahun 2009 jika ditinjau dari sisi ketenagakerjaan maka pada sektor Industri di kota Bengkulu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2007. Jika pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki sebanyak 129 orang maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 150 orang. Tenaga kerja wanita pun mengalami peningkatan dari 49 orang pada tahun 2007, menjadi 67 orang pada tahun 2009.

Sesuai dengan struktur ekonomi Kota Bengkulu pada sektor jasa-jasa dan perdagangan, maka jumlah tenaga kerja ada pada sektor jasa-jasa (reparasi mobil, reparasi motor dan lain sebagainya). Untuk nilai investasi sektor ini juga menempati nilai terbesar. Untuk nilai produksi industri meubel kayu dengan nilai terbesar.

Energi

Kinerja Perusahaan Listrik Negara IV Cabang Bengkulu Tahun 2008 relatif meningkat dari tahun ke-tahun. Indikator yang jelas terlihat adalah peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ini.

Tabel 1.13

Perkembangan Beberapa Indikator Penting PT. PLN 2004 - 2009

Perincian	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pekerja	orang	258	172	169	109	106	**)
Daya Terpasang	MW	150,52	37,23	37,23	54	54	64
Produksi Listrik	000 MWH	269,56	131,74	131,74	215.870,03	225.449,00	193.677.113,00
Tenaga listrik yang dijual	000 MWH	236,78	117.158,9	121.281,5	136.520,20	153.879,00	174.559.664,00
Biaya Input	000.000	**)	117,16	121,29	**)	**)	**)
Nilai Output	000.000	**)	6.279.000	**)	**)	**)	**)

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2009, BPS Kota Bengkulu

Koperasi

Koperasi merupakan representasi dari aktivitas usaha yang banyak dimiliki oleh masyarakat di daerah. Semakin banyak aktivitas ini menunjukkan makin besarnya keterlibatan masyarakat di dunia usaha. Selama periode 2004-2009 telah terjadi peningkatan jumlah koperasi, pada tahun 2004 jumlah koperasi telah mencapai 326 meningkat sebanyak 215 buah pada tahun 2009.

Tabel 1.14
Perkembangan Jumlah Koperasi Menurut Jenisnya Tahun 2004 - 2009

Jenis koperasi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Koperasi unit desa	3	3	3	2	2	2
Koperasi Pegawai Negeri	118	118	118	118	133	136
Koperasi karyawan	46	46	46	46	52	49
Koperasi Angkatan	6	6	7	7	7	8

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

Jenis koperasi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Koperasi Wanita	23	23	23	26	106	112
Koperasi Pedagang Pasar	3	3	3	3	3	3
Koperasi Serba Usaha	33	32	32	34	57	70
Koperasi Mahasiswa	5	5	5	5	5	5
Koperasi Angkutan	4	4	4	4	4	4
Koperasi Simpan Pinjam	5	5	5	7	11	15
Kopinkra	2	2	2	2	2	2
Kepontren	3	3	3	3	8	8
Koperasi Lainnya	65	74	95	109	70	115
Koperasi Sekunder	1	1	1	1	1	3

Jenis koperasi	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Koperasi Pelajar	9	9	9	9	9	9
Jumlah	326	334	356	376	470	541

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2006/2007 (Dinas Koperasi Kota Bengkulu)

Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut untuk Kota Bengkulu memainkan peranan yang cukup besar bagi perekonomian kota ini karena letak strategis Kota Bengkulu di daerah yang dikelilingi oleh laut. Selama tahun 2009 lalu lintas barang dan penumpang di Pelabuhan Pulau Baai selama periode 2000 - 2009 mengalami fluktuasi, walaupun pada akhirnya ditahun 2009 Pelabuhan Pulau Baai sudah berjalan lagi dengan normal. Tabel berikut ini menggambarkan lalu-lintas barang dan penumpang di Pelabuhan Pulau Baai.

Tabel 1. 15
Lalu Lintas Barang dan Penumpang di Pelabuhan
Pulau Baai
Tahun 2000 - 2009

Tahun	Barang (ton)		Penumpang (Orang)	
	Bongkar	Muat	Naik	Turun
2000	2.311.815	3.905.561	2.081	2.897
2001	300.284	497.833	2.246	2.371
2002	596.857	666.714	2.636	2.494
2003	1.706.146	4.431.320	-	-
2004	*	*	*	*
2005	*	*	*	*
2006	312.791	948.234	4.156	4.048
2007	204.217	1.107.635	3.459	4.181
2008	476.643	1.219.632	2.970	3.381
2009	540.798	1.582.785	2.758	2.700

*Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2006/2007
(Pelabuhan Pulau Baa*

**) data tidak tersedia*

Penginapan

Jumlah akomodasi yang ada pada tahun 2006 mencapai 39 buah yang tersebar di 4 kecamatan, dengan jumlah kamar mencapai 844 kamar. Dari seluruh akomodasi yang ada, menurut tingkatan hotel, terdiri dari hotel berbintang sebanyak 4 buah dan sisinya hotel tidak berbintang sebanyak 35 buah.

f. Sumber Daya Modal

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendorong perekonomian, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan dengan mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bengkulu.

Langkah kebijakan tersebut ditempuh melalui pemerataan dan mendorong potensi daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini belum memanfaatkan secara optimal, seperti jasa/perdagangan di semua bidang usaha kecil dan menengah. Di samping itu pertumbuhan ekonomi tersebut perlu didukung dengan peningkatan investasi dan ekspor non migas. Dalam kaitan dengan investasi dan ekspor non migas perlu pembenahan melalui penyederhanaan prosedur perijinan, penciptaan iklim usaha yang kondusif jaminan kepastian hukum serta

peningkatan fungsi perbankan dalam menyalurkan kredit untuk peningkatan usaha.

Dalam rangka peningkatan kemampuan ekonomi tersebut, tidak terlepas perlunya penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan yang jumlahnya cukup besar di Kota Bengkulu ini. Dalam hal ini perlu upaya untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan melalui penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, kerjasama kemitraan, penyusunan standar kompetensi serta jaminan sosial bagi tenaga kerja baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong dengan berbagai kebijakan lintas sektoral yang mengarah pada penciptaan kesempatan bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin agar pertumbuhan ekonomi riil lokal dapat terwujud dan dapat menggerakkan roda perekonomian daerah.

Didalam pengembangan sumberdaya modal di Kota Bengkulu, dari sisi penerimaan daerah, berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan pajak terus ditingkatkan. Penerimaan daerah tahun 2008 diharapkan meningkat terutama dari penerimaan pajak daerah. Sedangkan di sisi belanja daerah diharapkan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk

pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan usaha kecil dan menengah, pariwisata serta pembangunan sarana dan prasarana infrasfuktur. Di samping itu harus dilakukan pengendalian terhadap peningkatan anggaran belanja pegawai. Sebagai pelaksanaan dari konsolidasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 401.294.783.304 dan pada tahun 2008 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 433.130.383.500 atau 7%.

Gambaran keuangan daerah Kota Bengkulu pada tahun 2008 dapat dilihat dari struktur APBD. Di sisi penerimaan daerah, pemerintah Kota Bengkulu dengan berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan PAD terus dilanjut-kan, penerimaan dari sumber PAD diharapkan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 23.460.898.500 atau naik 5% dari tahun sebelumnya, sedangkan penerimaan dari sumber dana perimbangan diharapkan naik menjadi Rp. 401.389.485.000 atau naik 7% dan tahun sebelumnya sedang-kan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan akan naik sebesar Rp. 8.280.000.000 atau 15% dari tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Bengkulu tahun 2008 ditetapkan pada :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia
2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Peningkatan pelayanan publik
4. Pengembangan perekonomian kota
5. Peningkatan Infrastruktur perkotaan
6. Penanganan pasca bencana alam gempa bumi 12 September 2007
7. Perlindungan sosial kemasyarakatan
8. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

g. Potensi dan Peluang Investasi
Kebijakan Investasi

Kebijakan umum dibidang investasi di Kota Kota Bengkulu tidak terlepas dari visi dan misi yang telah digariskan yang pada akhirnya menghasilkan prioritas pembangunan daerah. 5 sektor unggulan yang sudah diprioritaskan oleh Kota Bengkulu adalah :

1. Sektor Pendidikan
2. Sektor Jasa, Perdagangan dan Industri
3. Sektor Perikanan dan Kelautan
4. Sektor Pariwisata
5. Sektor Infrastruktur

Dari lima prioritas tersebut diharapkan akan menghasilkan beberapa prospek investasi yang mungkin dilakukan di Kota Bengkulu. Dalam rangka memacu investasi baik ditingkat lokal, nasional dan, internasional, Pemerintah Kota Bengkulu meminimalisir beberapa kendala/faktor penghambat yang tentunya menuntut penanganan serius dari berbagai pihak. Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bengkulu antara lain :

1. Mengkaji ulang Peraturan Daerah yang dianggap tidak relevan dan yang dipandang menghambat investasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor;
2. Penyediaan tenaga kerja yang siap pakai (berkualitas dan kompetitif);
3. Melaksanakan pelayanan perizinan satu atap.

Di lain sisi, Kota Bengkulu mempunyai daya tarik tersendiri, yaitu :

1. Merupakan wilayah yang keamanannya kondusif;
2. Sumberdaya alam yang dimiliki masih murni;
3. Mempunyai aksesibilitas keluar dan masuk yang memadai;
4. Infrastruktur jalan yang cukup baik.

Potensi Infrastruktur

Jalan Darat

Pada tahun 2006 panjang jalan yang sudah diaspal dalam Kota Bengkulu adalah sepanjang 474 Km, 228 km di antaranya dalam keadaan baik dan 242 km dalam keadaan rusak sedang. Pembangunan infrastuktur jalan dijadikan prioritas oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka menunjang peningkatan kegiatan pereko-nomian dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat serta orang/penumpang,

Pelabuhan Laut

Di Kota Bengkulu terdapat satu Pelabuhan yang besar yakni Pelabuhan Samudera Pulau Baai. Pelabuhan Pulau Baai merupakan pelabuhan yang dapat diandalkan untuk menopang aktivitas bongkar muat arus barang dan jasa serta penumpang. Luas lahan pelabuhan ini 1.200 Ha, dengan perairan seluas 3.180 Ha, dan pelabuhan seluas 250 Ha. Kondisi fisik pelabuhan saat ini mempunyai panjang alur masuk pelabuhan 800m dengan jumlah dermaga 3 yakni Dermaga Nusantara dengan panjang 165 m dan lebar 18 m, Dermaga Lokal Panjang dengan panjang 124 m dan lebar 10 m dan Dermaga Nusantara dengan panjang 84 m dan lebar 18m.

Bandar Udara

Di Kota Bengkulu terdapat 1 bandar udara yang melayani penerbangan untuk berbagai tipe dan jenis

Dr. Zulkarnain. S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

pesawat. Ini dapat dilakukan setelah dilakukan peningkatan panjang landasan pacu. Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan di Kota Bengkulu antara lain: Sriwijaya Air, Lion Air; Batavia Air, dan Mandala Airline.

Perbankan

Keberadaan dunia perbankan sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan perekonomian dan kelancaran kegiatan perdagangan dan jasa, Selain adanya Kantor Bank Indonesia selaku Bank Sentral juga terdapat 4 (empat) buah Bank BUMN (BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BTN, BNI) dan 1 (satu) buah Bank BUMD (Bank pembangunan Bengkulu) serta 3 (tiga) buah Bank Swasta (Bank Danamon, BCA,BII), 2 (dua) Buah Bank Perkreditan Rakyat (Bank Muamalat dan Bank Safir Syariah), pelayanan jasa perbankan sudah menjangkau di setiap sudut Kota Bengkulu, terutama Bank BRI.

Air Bersih

Pelayanan air bersih dikelola oleh perusahaan Daerah/BUMD dan pelayanannya sudah menjangkau ke sebagian besar wilayah kota

Telekomunikasi dan Komunikasi

Telekomunikasi dan Komunikasi yang telah dimiliki daerah yaitu fasilitas pelayanan PT. Telkom (telepon rumah dan flexi), telepon seluler dan otomatis tersedia bahkan sampai seluruh penjuru kota, seperti PT. Indosat, PT. Telkomsel, PT. XL, PT. Mindo, PT. 3 GSM, PT. AXIS, Selain itu ada juga stasiun RRI Cabang Muda Bengkulu serta puluhan stasiun Radio Swasta Niaga dan amatir, Stasiun TVRI, Stasiun Relay RCTI, Stasiun Relay Metro TV, Stasiun Relay Indosiar dan Stasiun Relay SCTV, Stasiun Relay Trans7 dan TV.7 serta Stasiun TV Lokal BTV dan RBTB.

Listrik

Pelayanan tenaga listrik sudah menjangkau ke setiap pelosok kelurahan yang berasal dari PLTD yang tersebar di beberapa tempat pembangkit dan PLTA Musi.

Perhotelan

Di Kota Bengkulu terdapat 1(satu) Hotel bintang 3 (tiga) dan 1 (satu) Hotel Bintang 2 dan 2 (dua) Hotel Bintang 2 dan masih ada 36 buah hotel melati. Di sekitar kawasan obyek wisata banyak sekali berdiri hotel-hotel tidak berbintang sejenis *home stay*, *cottage*

atau *resort*, terutama di kawasan obyek wisata Pantai Panjang.

D. Jaringan Transportasi

Pengembangan transportasi sebagai salah-satu sektor yang penting dalam mewujudkan pembangunan dan ditujukan untuk menunjang mobilitas orang, barang dan jasa, yang mendukung pola distribusi serta pengembangan intra serta sub-wilayah (wilayah pembangunan) dalam Kota Bengkulu, agar setiap sub-wilayah dapat berkembang sesuai kebijakan pembangunan yang telah digariskan untuk masing-masing sub-wilayah tersebut.

Guna mencapai pertumbuhan sub - wilayah yang pesat serta mendukung fungsi/kedudukan Kota Bengkulu, maka pengembangan sistem transportasi dimaksudkan untuk :

1. Mengembangkan sistem interaksi inter dan antar subwilayah, antar Kota Bengkulu dengan daerah luarnya.
2. Mendukung fungsi Kota Bengkulu baik sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, maupun sebagai pintu masuk daerah tujuan wisata.
3. Mengembangkan hubungan antara Kota Bengkulu dengan wilayah-wilayah lainnya yang terdapat di Pulau Sumatera dalam kerangka sistem jaringan jalan lintas Sumatera.

1. Sarana dan Prasarana Transportasi

a. Transportasi Darat

Jaringan jalan sangat berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan perekonomian yang tentunya juga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Panjang jalan di Kota Bengkulu adalah 527 Km. Berdasarkan status jalan terdiri dari jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota.

Sarana Angkutan Umum

Sarana angkutan penumpang umum di Kota Bengkulu terdiri dari angkutan dalam kota dan angkutan antar kota dengan kota-kota sekitarnya. Angkutan penumpang umum merupakan sarana pergerakan penduduk kota dalam melakukan aktivitas dan pergerakan dari dan ke tempat tujuan.

Sarana Halte dan Penyeberangan

Halte (*shelter*) merupakan tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum bagi penumpang. Di Kota Bengkulu terdapat beberapa halte yang tersebar di di beberapa tempat, terutama pada pusat kegiatan dan terminal, baik untuk melayani angkutan kota maupun angkutan regional yang rutenya melalui halte. Sarana pejalan kaki yang ada di Kota Bengkulu selain trotoar adalah tempat penyeberangan (*zebra cross*).

Sarana Rambu dan Trotoar

Rambu lalu lintas adalah sarana yang mengatur dan memberi petunjuk bagi para pengguna kendaraan

ketika melintasi suatu jalan. Rambu lalu-lintas yang ada di Kota Bengkulu kondisi yang ada terbilang baik, walau pada beberapa bagian perlu ada penambahan dan peningkatan. Sedangkan di Kota Bengkulu keberadaan trotoar yang berfungsi bagi para pejalan kaki menyusuri pinggir jalan sebagian besar kondisinya baik. Trotoar yang ada terutama berada di jalan utama yakni jalan provinsi dan jalan kota.

Sarana Terminal

Kota Bengkulu sebagai pusat pelayanan regional terdapat beberapa terminal yaitu terminal regional (tipe A) dan terminal kota (tipe B). Pada saat ini terminal regional Terminal Air Sebakul yang terletak di timur wilayah kota, volume arus lalu-lintas orang antar provinsi relatif kecil, artinya belum berfungsi secara maksimal. Untuk terminal kota berjumlah 2 unit yaitu terminal Betungan dan terminal Sungai Hitam (berdasarkan SK Gubernur Tipe B). Sedangkan terminal Nakau fungsi pelayanan untuk masyarakat Kota Bengkulu, tetapi dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Ada satu terminal yang melayani pergerakan dalam wilayah Kota Bengkulu yakni terminal Panorama.

Prasarana Jalan

Jaringan jalan merupakan prasarana terpenting dalam sistem transportasi. Keterkaitan wilayah Indonesia satu dengan yang lain atau hubungan antara satu

wilayah dengan wilayah lain tidak lepas dari suatu sistem transportasi yang dihubungkan dengan jaringan jalan. Pengaruh tersebut dapat terjadi dari pola sistem transportasi internal dan sistem transportasi eksternal. Transportasi internal di Kota Bengkulu akan berpengaruh terhadap pola pergerakan internal kota dan wilayah sekitarnya. Sedangkan sistem transportasi yang lebih luas dalam arti keadaan transportasi yang dipengaruhi oleh pola-pola pergerakan antar wilayah atau kota/kabupaten. Elemen-elemen yang mendukung sistem transportasi adalah sarana dalam hal ini moda atau alat angkut dan prasarana atau infrastruktur yang berupa jaringan jalan.

Pola jaringan jalan di Kota Bengkulu pada umumnya berbentuk linier dan grid, mengingat kondisi lahan kota yang relatif datar serta pola jaringan jalan ini merupakan pola yang paling efisien dalam mendukung pergerakan penduduk. Jangkauan pelayanan jalan di Kota Bengkulu saat ini terbatas pada wilayah-wilayah yang secara alami berkembang dengan pesat, sedangkan jangkauan pelayanan jalan masih relatif pada wilayah-wilayah yang belum berkembang. Oleh karena itu tingkat kepadatan jalan per-hektar tertinggi di Kota Bengkulu berada di 3 kecamatan yang menjadi bagian wilayah pusat kota yaitu Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Ratu Samban, sedangkan jangkauan pelayanan jalan di tiga kecamatan lainnya yang perkembangannya relatif lebih lambat.

Dr. Zulkarnain. S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

Jaringan jalan provinsi yang ada di Kota Bengkulu yakni Jalan Sukarno Hatta, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Semangka dan Jalan Salak dengan total panjang jalan provinsi sebesar 3,60 km. Kondisi jalan pada saat ini baik dengan permukaan jalan aspal, hanya 0,35 km saja yang kondisinya sedang.

Panjang jalan tahun 2009 secara keseluruhan adalah 597,98 km, yang tercatat dengan kondisi baik hanya 485,80 km, dan selebihnya dalam kondisi sedang sampai rusak berat. Perkembangan panjang jalan dan kondisi jalan di Kota Bengkulu dalam 10 terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 16
Kondisi Jaringan Jalan Kota Bengkulu
Tahun 1997 - 2009

Tahun	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1997	223	137	69	60	489
1998	299	109	34	80	522
1999	314	96	34	78	522
2000	299	109	34	80	522
2001	245	153	44	80	522

Tahun	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
2002	234	214	59	76	583
2003	200	150	53	27	430
2004	219	195	44	31	489
2005	228	242	13	8	491
2006	328	158	13	8	507
2007	428,67	91,19	18,84	10,74	549,43
2008	462,67	91,19	4,84	3,37	562,07
2009	485,80	95,75	9,68	6,75	597,98

Sumber : Profil Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, 2009

b. Transportasi Laut

Kota Bengkulu adalah sebuah kota yang banyak mengekspor hasil bumi yang ditunjang oleh berbagai sarana dan prasarana transportasi yang salah satunya adalah menggunakan jalur laut. Sarana yang dibutuhkan untuk melayani jalur laut sudah cukup tersedia, seperti moda transportasi berupa kapal cepat (*speed boat*), kapal motor besar/tongkang, kapal motor tempel, dan kapal tanpa motor. Sedangkan prasarana yang tersedia berupa dermaga kecil dan pelabuhan bongkar muat (Pelabuhan Pulau Baai).

Transportasi laut di Kota Bengkulu ditunjang oleh adanya sungai, selain itu potensi ini ditunjang pula dengan adanya Pelabuhan Pulau Baai yang terbuka untuk perdagangan dalam dan luar negeri. Melalui pelabuhan Pulau Baai ini, Kota Bengkulu terhubung secara regional dengan antar pulau dan kota lain. Untuk pelayanan pergerakan orang, hanya mempunyai rute pelayanan dari Kota Bengkulu ke Pulau Enggano.

c. Transportasi Udara

Keberadaan bandar udara Kota Bengkulu yang terletak kurang lebih 14 km sebelah Selatan pusat kota, persisnya berada di Jalan Arteri sekitar Kelurahan Pekan Sabtu dan Betungan. Pada saat ini, bandara udara Fatmawati Soekarno masih digunakan untuk melayani angkutan sipil, yakni angkutan orang dan barang, dan melayani angkutan regional yaitu Bengkulu – Jakarta dengan penerbangan dua sampai tiga kali sehari pulang pergi.

Dilihat dari lokasi dan kaitannya dengan keselamatan penerbangan, maka Kota Bengkulu masuk dalam kawasan pendekatan dan lepas landas. Hal ini menyebabkan perkembangan Kota Bengkulu harus dikendalikan agar tidak mengganggu kegiatan penerbangan di Bandar Udara Fatmawati Soekarno dan kegiatan kota.

d. Moda Transportasi

1). Moda Angkutan Darat

Sarana transportasi darat yang tersedia di Kota Bengkulu umumnya terdiri dari moda transportasi berupa kendaraan angkutan pribadi, angkutan umum dalam kota (angkot), angkutan regional (AKDP/AKAP), angkutan barang, serta terminal.

Kota Bengkulu merupakan salah-satu kota yang lambat perkembangan perkotaannya, terutama bagi sektor sosial dan ekonomi kota. Sejalan dengan perkembangan tersebut, diperlukan sarana angkutan umum yang baik untuk mendukung perkembangan kegiatan perkotaan. Jenis kendaraan angkutan penumpang yang terdapat di Kota Bengkulu terdiri dari angkutan penumpang umum (oplet) dan taxi.

Jumlah pergerakan lalu-lintas di Kota Bengkulu selain disebabkan oleh adanya bangkitan lalu lintas internal kota juga disebabkan oleh adanya pergerakan lalu-lintas regional antar kota dan provinsi. Oleh karena itu perkembangan jaringan jalan di Kota Bengkulu perlu mengantisipasi peningkatan kedua pergerakan lalu-lintas tersebut.

Pengembangan jalan di Kota Bengkulu juga digunakan untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah potensial serta menarik perkembangan suatu wilayah, seperti wilayah yang memiliki potensi pariwisata seperti pantai pariwisata alam dan cagar alam yang ada di Kota Bengkulu.

2). Moda Angkutan Laut

Moda Angkutan Penumpang

Moda transportasi yang menggunakan jalur laut di Kota Bengkulu pada saat ini masih terbatas pelayanannya pada wilayah sekitar saja, yaitu penyeberangan ke Pulau Enggano. Pelayanan penumpang di pelabuhan Pulau Baai sangat terbatas, karena pelayanan kapal sebagian besar untuk mengangkut barang dan untuk angkutan penumpang masih terbatas untuk penyeberangan ke Pulau Enggano. Pada Tahun 2009 bulan Desember tercatat kedatangan 2.758 penumpang dan keberangkatan 2.700 penumpang.

Moda Angkutan Barang

Moda angkutan barang yang menggunakan jalur laut yaitu kapal khusus angkutan barang/kargo dan kapal penumpang yang difungsikan juga untuk membawa barang-barang. Untuk kegiatan bongkar muat migas dilakukan melalui dermaga khusus Pertamina, sedangkan ekspor non migas dilakukan di Pelabuhan Pulau Baai dengan jenis barang meliputi hasil tambang (batu bara) serta hasil hutan dan olahannya. Impor yang melalui Pelabuhan Pulau Baai meliputi aspal, mesin-mesin industri, dan lain-lain.

Kegiatan bongkar-muat lainnya di Pelabuhan Pulau Baai meliputi jenis komoditi batu-bara, kayu bulat, inti sawit, pupuk, beras, gula, garam, dan lain-lain. Adapun jenis kapal yang membawa barang-barang

tersebut adalah kapal dalam negeri (nusantara, lokal, rakyat), tanker (asing, nasional).

3). Moda Angkutan Udara

Moda angkutan udara yang melayani Kota Bengkulu saat ini berupa angkutan pesawat terbang, khususnya untuk penumpang. Beberapa jenis pesawat merupakan moda angkutan berasal dari berbagai maskapai penerbangan dalam negeri yaitu Sriwijaya, Lion Air, dan lainnya. Status Bandara Fatmawati Soekarno adalah bandara nasional dengan fungsi sebagai bandara tersier.

Angkutan Penumpang

Peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan pesawat dalam beberapa tahun terakhir juga dirasakan oleh penduduk kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari data yang tercatat di Pelabuhan Udara Fatmawati pada tahun 2009, penumpang yang naik/datang berjumlah tercatat kedatangan 21.037 penumpang dan keberangkatan 22.413 penumpang.

Angkutan Barang

Ditinjau dari lalu lintas penerbangan non penumpang, kegiatan bongkar muat dirinci menjadi barang dan bagasi. Volume bongkar barang pada tahun 2009 terbesar pada bulan Desember sebesar 136.416 kg sedang volume muat barang terjadi pada bulan Desember sebesar 60.087 kg. Untuk lebih jelasnya, pergerakan barang yang melalui bandar udara di Kota

Bengkulu pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.17
Lalu Lintas Udara Angkutan Barang Penerbangan
Dalam Negeri

Uraian	Barang / Cargo	
	Dimuat	Dibongkar
	<i>Loaded</i>	<i>Unloaded</i>
Januari / <i>January</i>	42.576	123.387
Pebruari / <i>Feb</i>	37.014	135.412
Maret / <i>March</i>	29.271	103.403
April / <i>April</i>	32.088	116.100
Mei / <i>May</i>	34.710	132.489
Juni / <i>June</i>	48.444	142.092
Juli / <i>July</i>	44.503	113.177
Agustus / <i>August</i>	35.942	94.974
September / <i>Sep</i>	25.639	110.560
Oktober / <i>Oct</i>	28.734	116.342
Nopember / <i>Nov</i>	32.486	128.237
Desember / <i>Dec</i>	60.087	136.416

Sumber : Profil Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, 2009

E. Fasilitas dan Utilitas Perkotaan

1). Fasilitas Perkotaan

i. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan termasuk lengkap di Kota Bengkulu mulai dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Keberadaan fasilitas pendidikan tinggi yang lengkap tersebut menarik penduduk untuk datang ke Kota Bengkulu. Jumlah perguruan tinggi yang ada di Kota Bengkulu 4 buah yang terdiri dari 1 perguruan tinggi negeri dan 3 perguruan tinggi atau akademi swasta. Banyaknya fasilitas pendidikan yang ada di Kota Bengkulu totalnya 280 sekolah mulai dari TK hingga SMU, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kondisi sekolah sebagian besar tergolong baik. Hal ini ditandai dengan salah satu fungsi Kota Bengkulu adalah sebagai pusat pendidikan tinggi di wilayah Kota Bengkulu (Bengkulu sebagai Kota Pelajar).

Tabel 1.18

**Jumlah Fasilitas Pendidikan Kota Bengkulu
Tahun 2009**

No	Fasilitas	Negeri	Swasta	Jumlah
		(Unit)	(Unit)	(Unit)
1	TK	6	87	93
2	SD	82	10	92

No	Fasilitas	Negeri	Swasta	Jumlah
		(Unit)	(Unit)	(Unit)
3	SLTP	34	16	50
4	SMU	19	22	41
5	Perguruan Tinggi	1	3	4
Total		142	138	280

*Sumber : Bengkulu Dalam Angka
Tahun 2009, BPS Kota Bengkulu*

ii. Fasilitas Kesehatan

Pada tahun 2009 rasio ketersediaan fasilitas rumah sakit adalah 1,85 per 100.000 penduduk yang berarti bahwa kurang lebih 1 rumah sakit melayani 100.000 orang. Sedangkan rasio puskesmas adalah 32,79 yang berarti bahwa untuk 100.000 penduduk tersedia 33 puskesmas, baik puskesmas induk, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling.

Persalinan yang aman adalah persalinan dibantu oleh dokter atau bidan, hal ini untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi yang angkanya di Indonesia masih cukup tinggi. Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa baik persalinan yang ditolong bidan, kunjungan internal maupun postnatal yang paling banyak terjadi pada tahun 2003 dan sampai tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

iii. Fasilitas Peribadatan

Sebagian besar penduduk Kota Bengkulu adalah beragama Islam, dengan demikian jumlah fasilitas peribadatan yang ada di Kota Bengkulu didominasi oleh masjid. Penyebaran sarana peribadatan ini menyebar rata di wilayah Kota Bengkulu, terutama berada di lingkungan permukiman. Jumlah fasilitas peribadatan umat muslim tercatat sebanyak 76,9% dari jumlah fasilitas peribadatan lainnya.

Tabel 1. 19

Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kecamatan Kota Bengkulu, Tahun 2009

No	Kecamatan	Masjid	Musolah	Langgar	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
1	Selebar	90	2	0	0	0	0	0
2	Kampung Melayu	24	2	0	0	0	0	0
3	Gading Cempaka	79	11	0	2	22	1	1
4	Ratu Agung	48	2	0	2	0	0	0

Dr. Zulkarnain. S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH

5	Kec. Singaran Pati *	-	-	-	-	-	-	-
6	Ratu Samban	22	2	0	0	0	0	0
7	Teluk Segara	19	0	0	0	0	0	0
8	Sungai Serut	25	0	0	0	0	0	0
9	Muara Bangkahulu	52	4	0	0	0	0	0
Jumlah		313	78	1	4	7	2	2

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2006/2007, BPS Kota Bengkulu

*Ket : * Pemekaran dari Kec. Gading Cempaka (data masih tergabung dengan kecamatan induk)*

e. Pelayanan Umum Lainnya

Fasilitas pelayanan umum meliputi kantor polisi, kantor pos, kantor telekomunikasi dan kantor PLN. Lokasi dari fasilitas pelayanan umum terutama di dalam dan di sekitar pusat Kota Bengkulu.

f. Fasilitas Perekonomian

Untuk menunjang perekonomian daerah, kegiatan perekonomian serta kelengkapannya mempunyai peranan yang sangat penting. Saat ini di Kota Bengkulu sudah terdapat pasar yang menjual berbagai keperluan penduduk, pertokoan berupa mall dan swalayan, toko, warung/ kios dan lain-lain. Lokasi fasilitas perekonomian tersebut menyebar di setiap kecamatan dan untuk bangunan mall serta swalayan umumnya berada di pusat kota. Adapun jumlah fasilitas perekonomian tersebut adalah pasar, toko dan kios/warung.

Pasar Tradisional

Berdasarkan statusnya, pasar yang ada di Kota Bengkulu terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pasar Kota Bengkulu dan pasar yang dikelola swasta. Menurut jenis kegiatannya, pasar yang ada di Kota Bengkulu didominasi oleh pasar tradisional.

Rumah Toko (Ruko)

Dari semua jenis fasilitas perdagangan yang eksis di Kota Bengkulu, pertumbuhan ruko merupakan

fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa sebaran ruko hampir mencakup semua lokasi. Perkembangannya pun cenderung memanfaatkan jaringan jalan, baik jalan arteri, kolektor, bahkan lokal.

Intensitas perkembangan ruko yang dulunya lebih terkonsentrasi di pusat kota, kini telah bergeser ke arah pinggiran, terutama pada koridor-koridor arteri seperti Jl. Suprpto, Jl. S. Parman, dan Jl. Basuki Rahmat.

Dari kacamata ekonomi, perkembangan ini menunjukkan adanya indikator pertumbuhan perekonomian yang cukup positif. Namun dari sudut pandang planologis, perkembangan yang terkesan tidak terarah ini akan memberikan dampak terhadap kualitas wajah kota yang monoton dan menghilangkan kesan spesifik suatu kawasan.

Mall

Selanjutnya, Perkembangan kegiatan perekonomian di Kota Bengkulu selain dilihat dari indikator tingkat transaksi, kinerja ekspor dan sirkulasi uang, juga dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan/fasilitas perdagangan, terutama investasi fasilitas perdagangan skala besar. Tercatat, pada tahun 2007 baru terdapat 2 mall di Bengkulu dengan skala pelayanan kota dan menjadi ikon pusat belanja Kota Bengkulu. Lokasinya yang tersebar pada beberapa titik secara aktual akan

berpengaruh terhadap struktur pelayanan Kota Bengkulu dan berkonsekuensi terhadap kecenderungan pemanfaatan lahan dan arus transportasi darat.

g. Fasilitas Olahraga, Rekreasi, dan Ruang Terbuka Hijau

Fasilitas Olahraga

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, dapat dideskripsikan bahwa hanya ada 1 lapangan olahraga yang berada di Kecamatan dengan skala pelayanan kawasan yang dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan olahraga masyarakat sekitarnya. Selibhnya terdapat lapangan olahraga dalam skala kecil (lapangan sepakbola) yang rata-rata merupakan fasilitas spontan yang dibangun oleh masyarakat dengan memanfaatkan lahan tidur yang sewaktu-waktu dapat berubah fungsi menjadi lahan terbangun.

Rekreasi

Sama halnya seperti sarana olahraga, sarana rekreasi di Kota Bengkulu masih didominasi oleh rekreasi alam. Kawasan yang menjadi arena rekreasi di antaranya kawasan wisata pantai. Sejak adanya pusat-pusat perdagangan baru yang berkembang pada beberapa lokasi di Kawasan Pusat Kota, telah memberikan alternatif baru kepada penduduk kota untuk memenuhi kebutuhan rekreatif meskipun hanya sekedar melihat-lihat keramaian dan produk yang ditawarkan.

Ruang Terbuka Hijau

Saat ini kontribusi ruang terbuka hijau di Kota Bengkulu lebih di dominasi oleh lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang berada di pinggiran kota. Ruang terbuka hijau di dalam kota yang benar-benar ditata untuk fungsi sebagaimana disebutkan di atas masih terbatas pada penataan jalur hijau sepanjang Jalan. Selain itu, yang paling terkini adalah penataan kawasan Mesjid utama sebagai *landmark* Kota Bengkulu yang dilengkapi dengan taman dan lapangan bermain. Pada ssaat ini luas RTH Kota Bengkulu tercatat 5.350.500 m².

Lebih jauh, pada dasarnya Pemerintah Kota masih memiliki ruang gerak yang cukup leluasa untuk melakukan penataan dan penetapan target yang akan dicapai dalam rangka realisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota. Oleh karena itu, Kesuksesan program penyediaan ruang terbuka hijau yang representatif bagi Kota Bengkulu tidak akan tercapai tanpa campur tangan pemerintah sebagai regulator dalam menjaga konsistensi komitmen implementasi RTH sebagai-mana yang akan dihasilkan dalam rencana tata ruang kota.

h. Fasilitas Pemerintahan dan Perkantoran Umum

Fasilitas pemerintahan dan perkantoran umum yang ada di Kota Bengkulu umumnya cukup lengkap dan tersebar di pusat kota. Fasilitas pemerintahan sebagian

besar berupa kantor instansi/dinas Pemerintahan Kota Bengkulu dan kantor instansi/dinas Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kantor-kantor pemerintahan ini umumnya berada dekat dengan Kantor Walikota Bengkulu. Sedangkan kantor-kantor yang berada di tingkat kecamatan tersebar merata di seluruh kecamatan, seperti kantor kecamatan, kantor polisi, dan lainnya.

Kawasan pemerintahan kota mengelompok di Jl. Basuki Rahmat, Jl. S. Parman dan Jl. Jati. Sedangkan kegiatan pemerintahan provinsi di sekitar di sepanjang Jl. Pembangunan dan sekitar kawasan Padang Harapan. Untuk kegiatan pemerintahan yang tersebar berada di bagian selatan kota, seperti kantor Samsat.

i. Pemakaman Umum

Fasilitas pemakaman umum Kota Bengkulu tersebar di seluruh wilayah dengan luas secara keseluruhan 36,8 Ha yang diperuntukkan bagi agama Islam dan Kristen. Tempat pemakaman umum di Kota Bengkulu tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.

2). Utilitas Perkotaan

a. Air Bersih

Air bersih di Kota Bengkulu saat ini mempunyai 2 unit instalasi pengolahan air (IPA) yaitu IPA Surabaya dan IPA Nelas. Produksi PAM tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 6,74 persen dibanding tahun 2008 dengan produksi sebesar 12.242.741 m³ nilai produksi

PAM tahun 2009 juga mengalami peningkatan sebesar 15,17 persen dengan nilai produksi sebesar 14,016 milyar rupiah.

b. Air Baku dan Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Guna pemenuhan produksi air bersih dimanfaatkan Sungai Nelas dan Sungai Bengkulu sebagai sumber air baku yang diolah secara lengkap mulai dari koagulator sampai filter dan air bersih yang dihasilkan ditampung dalam reservoir untuk di distribusikan ke konsumen. Instalasi pengolahan air yang dimiliki PDAM Bengkulu adalah IPA Nelas memanfaatkan air baku dari Sungai Nelas dengan kapasitas rencana 400 lt/dt dan IPA Surabaya dengan memanfaatkan air baku dari Sungai Bengkulu dengan kapasitas rencana 200 lt/dt, namun dari kedua IPA tersebut yang baru di produksi adalah IPA Nelas 200 lt/dt dan IPA Surabaya 160 lt/dt. IPA Surabaya sendiri terdiri atas 4 unit IPA yaitu : IPA Belanda, IPA Degremont dan 2 unit IPA Lepen Kencana.

c. Drainase

Sebagai Kota yang terletak di tepi pantai dengan kontur yang relative datar dengan perbedaan elevasi yang kecil terhadap permukaan air laut memungkinkan sebagian wilayah dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang mengakibatkan aliran drainase tidak lancar dan meluasnya genangan dan rawa. Di Kota Bengkulu kawasan yang sering mengalami genangan air adalah Teluk Sapang dan Tanjung Agung. Saluran drainase di Kota Bengkulu

sebagian masih bersifat alami, hanya pada kawasan-kawasan tertentu yang sudah permanen.

d. Persampahan

Kota Bengkulu memiliki tempat pembuangan akhir sampah (TPA) seluas 11 Ha yang terletak di Desa Sukarame - Air Sebakul, Kecamatan Selebar yang berjarak 15 Km dari pusat kota, namun dari luas tersebut efektif saat ini adalah 3,5 Ha saja. TPA ini mampu menampung sampah sebesar 330.000 m³. Sejauh ini pengelolaan sampah di TPA baru berupa Open Dumping. TPA Air Sebakul didukung fasilitas :

1. Jalan masuk sepanjang 300 m aspal dan 500 m macadam.
2. 1 (satu) bangunan pengontrol kegiatan TPA termasuk pencatatan ritasi armada sampah yang masuk
3. 1 (satu) instalasi penampungan cairan lindi yang terdiri dari 2 (dua) kolam leacheat.
4. (dua) sumur control.

Sampai saat ini baru 45,6% dari keseluruhan sampah Kota Bengkulu yang dapat diolah setiap harinya mengingat daya angkut armada yang dimiliki hanya mampu mengangkut sampah sebanyak 338,4 m³/hari. Selain dilakukan pembuangan sampah ke TPA oleh Dinas Kebersihan, masyarakat Kota Bengkulu juga melakukan pengumpulan sampah secara langsung sebagai individu atau kelompok terutama :

1. Masyarakat yang dekat dengan tempat pembuangan sementara (TPS), tong sampah atau *container* sampah
2. Daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Dinas Kebersihan secara langsung baik itu pengumpulan ataupun pengangkutan sampah.
3. Memiliki lahan untuk pemusnahan sampah untuk dibakar ataupun di timbun.

e. Sumber Timbulan Sampah Kota Bengkulu

Sumber timbulan sampah Kota Bengkulu secara umum dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Sampah domestik adalah timbulan sampah dari rumah tangga yang mendominasi sampah Kota Bengkulu yang mencapai 80% produksi sampah Kota Bengkulu.
2. Sampah non-domestik, yakni :
 - a. Sampah perkantoran/sekolah
 - b. Sampah pabrik
 - c. Sampah rumah sakit, dan lainnya

f. Karakteristik Sampah Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh *Bengkulu Water Supply And Sanitation – ISP* Tahun 1998 bahwa sampah yang dihasilkan Kota Bengkulu mempunyai karakteristik sampah organik (70,78%) sedangkan sisanya adalah sampah anorganik. Pada tabel berikut dapat dilihat secara lengkap karakteristik sampah Kota Bengkulu. Karakteristik sampah di Kota Bengkulu adalah :

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Sampah Organik | : 70,78% |
| 2. Sampah an organik | : 29,22% |
| a. Plastik | : 7,82% |
| b. Gelas | : 0,62% |
| c. Logam | : 3,64% |
| d. Mineral lain | : 2,31% |

g. Air Limbah

Sebagaimana yang diketahui bahwa air limbah terdiri atas limbah rumah tangga (domestik) dan limbah industri (non-domestik), fasilitas pengolahan air limbah yang dimiliki Kota Bengkulu adalah untuk mengolah limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) seluas 5 Ha dengan kapasitas 15 – 30 m³/hari yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung. IPLT Sawah Lebar terdiri dari kolam anaerobik I dan II, kolam fakultatif I dan II, serta 1 (satu) unit kolam maturasi. Penyaluran limbah tinja dari sumbernya menggunakan tangki tinja mengingat Kota Bengkulu masih belum memiliki sistem penyaluran air limbah berupa *riool*.

h. Telekomunikasi

Pada saat ini sarana telekomunikasi di Kota Bengkulu telah mencapai seluruh wilayah Kota Bengkulu dan pihak swasta pun berlomba untuk dapat memeberikan pelayanan telekomunikasi.

i. Penyediaan Sumber Energi

Sumber tenaga listrik di Kota Kota Bengkulu adalah jaringan interkoneksi Sumatra dengan kapasitas terpasang pada Gardu Induk Suka Merindu 60 MVA yang di distribusikan melalui sistem interkoneksi dengan Gardu Induk Pulau Baai berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

F. Pariwisata

Kota Bengkulu memiliki beberapa obyek wisata yang potensial dikembangkan untuk mendukung perkembangan kota secara keseluruhan. Obyek wisata yang ada dapat dikelompokkan dalam Wisata Alam dan Wisata Sejarah.

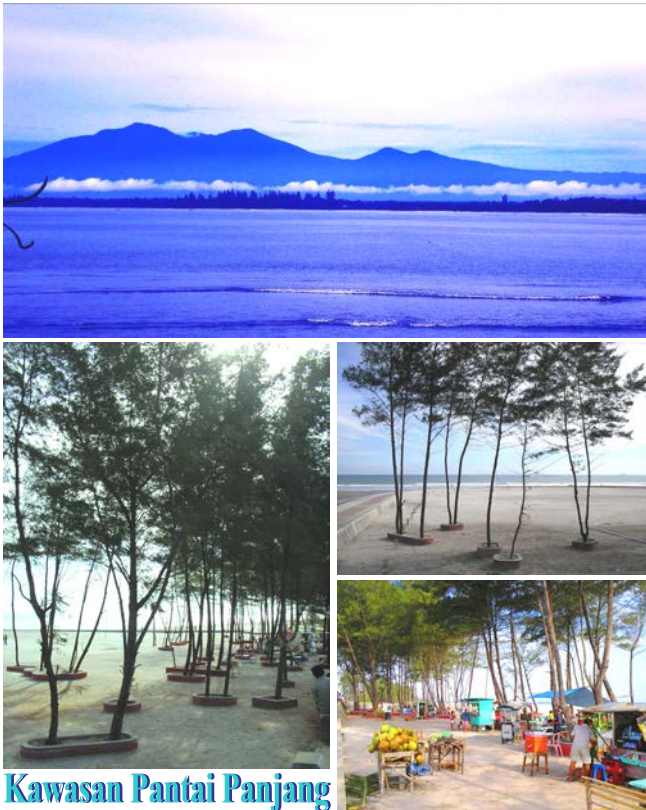
Obyek wisata alam yang paling dikenal di Kota Bengkulu adalah Pantai Panjang yang memanjang dari Pelabuhan Pulau Baai sampai ke perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu adalah Kawasan Cagar Alam Dusun Besar yang di dalamnya juga berada Danau Dendam Tak Sudah.

Kawasan Pantai Panjang sedang dikembangkan sebagai Taman Wisata Alam yang sudah memiliki rencana pengembangan dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Pengembangan Taman Wisata Alam Pantai Panjang ini akan diintegrasikan dengan obyek wisata sejarah yang juga berada di kawasan

pesisir Kota Bengkulu, seperti Benteng Marlboroungh, Benteng York di Muara Sungai Serut, Tapak Paderi, Kawasan Pecinaan, dan Tugu Thomas Parr.

Gambar 1.15

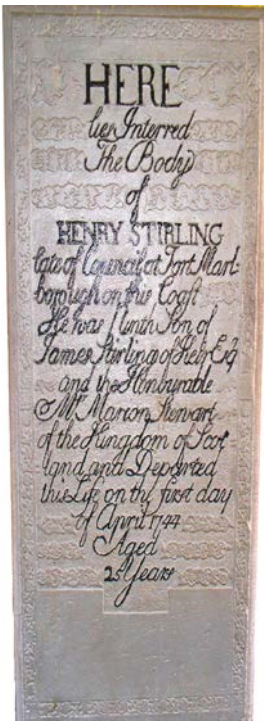
Visualisasi Potensi Wisata Kota Bengkulu



Kawasan Pantai Panjang

Kawasan Pantai Panjang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Provinsi Bengkulu dikembangkan sebagai Taman Wisata Alam (TWA) yang memadukan fungsi lindung dengan pengembangan sektor pariwisata

Dr. Zulkarnain, S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH



Benteng Marlborough terletak di ketinggian ± 18 m dpl, yang dibangun untuk mengamati pemukiman di sekitarnya yang terdiri dari kawasan pemerintahan, kawasan perekonomian, dan kawasan hunian.

Selain itu, fungsinya adalah untuk mengamati kapal-kapal yang melintasi perairan Bengkulu. Dari benteng dapat mengamati titik terjauh hingga muara Sungai Selebar dan Sungai Lemau yang merupakan lokasi kerajaan-kerajaan di Bengkulu pada masa pendudukan Inggris pada abad XVIII.



KAWASAN PECINAAN

Kawasan Pecinaan (Kampung China) terletak 190 meter di sebelah selatan dari Benteng Marlborough. Kawasan ini merupakan pemukiman Cina sejak masa Kolonial Inggris.

Terdapat sekitar 20 buah rumah tinggal yang berarsitektur China di kawasan ini. Rumah-rumah tersebut umumnya memanjang ke arah belakang, bertingkat 2, dan beratap lengkung. Terlihat juga rumah-rumah tersebut diberi hiasan terawangan yang terdapat di atas jendela yang berfungsi sebagai ventilasi sebagaimana umumnya pada arsitektur rumah China.

Dr. Zulkarnain, S, M.Ag
Wery Gusmansyah, MH



M
G

masjid tersebut berbentuk sederhana, dibuat dari kayu dan beratap rumbia. Pada awal abad XX masyarakat membangun masjid tersebut menjadi lebih baik dengan cara swadaya. Bagian dinding diganti dengan tembok, dan bagian atap diganti dengan seng yang sekaligus memperluas masjid tersebut. Pada tahun 1938, bangunan masjid didesain ulang oleh Bung Karno yang biaya ditanggung oleh masyarakat sendiri. Bung Karno tidak mengubahnya secara keseluruhan, melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja. Bagian dinding masjid ditinggikan 2 meter, dan bagian lantai ditinggikan 30 cm. Bung Karno memberikan ciri khas pada bagian atap dengan membentuk atap limasan kerucut dengan memberikan celah pada pertengahan atap. Pada beberapa bagiannya ditambah tiang yang di bagian atasnya diberi ukiran dan pahatan berbentuk sulur-suluran yang dicat warna emas.



Dilihat dari model dan gaya bangunannya diperkirakan bangunan tersebut dibangun pada akhir abad XIX dan awal abad XX pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Dugaan tersebut diperkuat oleh laporan Van Der Vinne tahun 1843, yang tidak menyebutkan keberadaannya di Bengkulu pada saat itu.

Tugu ini berupa bangunan monumental untuk memperingati Thomas Parr, Residen EIC yang tewas dibunuh oleh rakyat Bengkulu. Tugu tersebut berdenah segi delapan, diberi tiang-tiang bergaya *corintian*. Pintu masuk pada tugu tersebut terdapat di bagian depan dan sisi kanan dan kiri. Bentuk pintu masuk lengkung sempurna, tanpa daun pintu. Pada salah satu dinding di ruang dalam terdapat sebuah prasasti, tetapi pada saat ini sudah tidak terbaca lagi. Bagian atas tugu diberi atap berbentuk kubah.

TAPAK PADERI



Sentot Alibasyah adalah seorang panglima dalam perang Diponegoro (1825-1830). Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Paderi di Sumatera Barat. Oleh karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Paderi, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang di Bengkulu hingga akhir hayatnya.

Makam Sentot Alibasyah terletak di Desa Bajak, Kecamatan Teluk Segara, pada ketinggian 38 meter dpl. Pada masa Kolonial Belanda letaknya agak di luar kota, sedangkan saat ini berada di dalam kota. Pada makam Sentot tertulis tanggal pemakaman 17 April 1885.

Menurut penuturan masyarakat, bangunan cungkup yang ada di atas makam Sentot Alibasyah adalah bangunan baru. Hal itu menunjukkan bangunan makam tersebut pada awalnya sangat sederhana, tanpa bangunan tambahan. Makam tidak ditandai dengan nisan, berbeda dengan umumnya makam-makam muslim di Nusantara.



Rumah pengasingan Bung Karno terletak di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kec. Gading Cempaka, berada pada ketinggian 64 m dpl. Soekarno menempati rumah tersebut sejak tahun 1938 - 1942.

Dilihat dari gaya bangunannya, rumah tersebut dibangun pada abad XX. Luas rumah 162 m², dengan luas tanah keseluruhan adalah 40.434 m². Pada saat ini luasnya tinggal 10.000 m² sebab halaman depan terpotong untuk pelebaran jalan.

KOMPLEKS MAKAM JITRA



Kompleks Makam Jitra. Pada kompleks makam terdapat 15 buah makam yang bentuknya bangunan monumental. Pada beberapa bangunan terdapat lebih dari satu buah nisan, umumnya 2- 4 buah nisan. Berdasarkan atas tulisan pada nisan-nisannya diketahui kronologi dari nisan-nisan tersebut berkisar antara tahun 1775 sampai 1940. Diperkirakan kompleks makam dipergunakan pula pada masa Belanda menguasai Bengkulu. Hal itu terlihat dari nama dan bahasa yang terdapat pada nisan-nisan tersebut. Pada nisan-nisan yang tertua sampai awal abad XIX yang tercantum adalah nama-nama orang Inggris dan keterangan-keterangan lainnya ditulis dalam Bahasa Inggris; sedangkan pada nisan-nisan yang lebih muda nama-nama yang tercantum adalah nama-nama orang Belanda dan keterangan-keterangan lainnya ditulis dalam Bahasa Belanda.

G. Intensitas Pembangunan Kota

Intensitas ruang di kota Bengkulu Saat ini dapat di kelompokkan menjadi 3 kategori yaitu lingkungan dengan intensitas tinggi, lingkungan dengan intensitas sedang dan lingkungan dengan intensitas rendah yang diidentifikasi dari jumlah bangunan per-ha dan tutupan bangunan terhadap lahan dalam satu kawasan serta ketinggian bangunan.

Secara umum intensitas ruang di kota Bengkulu saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan dengan Intensitas Ruang Tinggi

Lingkungan dengan intensitas ruang tinggi di kota Bengkulu berkembang pada koridor sepanjang jalan kolektor dan jalan arteri kota khususnya di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, dan Kecamatan Ratu Samban. Selain itu juga berkembang di sepanjang jalan lingkungan khususnya di kecamatan- kecamatan di kawasan pusat kota. Ketinggian bangunan di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor antara 1 – 4 lantai sedangkan ketinggian bangunan di jalan lingkungan antara 1 – 2 lantai.

2. Lingkungan Dengan Intensitas Ruang Sedang

Lingkungan dengan kepadatan sedang berkembang di sepanjang jalan kolektor di Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Samban dan sebagian Kecamatan Muara Bangkahulu. Ketinggian bangunan di jalan kolektor antara 1 – 4 lantai khususnya untuk

bangunan perdagangan dan jasa, sedangkan pada jalan lingkungan bangunan perumahan antara 1 – 2 lantai.

3. Lingkungan dengan Intensitas Ruang Rendah

Lingkungan dengan intensitas ruang rendah terdapat di Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Selebar, Kecamatan Gading Cempaka, sisi utara Kecamatan Bangkahulu, dan Kecamatan Sungai Serut bagian hulu. Lingkungan dengan intensitas rendah merupakan lahan kosong yang belum terbangun berupa semak belukar, kebun campuran dan sawah. Selain itu lingkungan dengan kepadatan rendah juga terdapat di Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Kampung Melayu di lokasi tepi pantai.

H. Identifikasi Potensi dan Masalah

1. Potensi

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan maupun pencermatan terhadap data sekunder dan data primer yang ada, dapat diidentifikasi beberapa potensi pengembangan yang akan mempengaruhi perkembangan Kota Bengkulu dimasa mendatang, yaitu :

1. Lahan yang belum dibudidayakan masih relatif luas. Dari total luas lahan Kota Bengkulu 144,52 Km², yang sudah terbangun baru mencapai 31,74%.

2. Kondisi topografi Kota Bengkulu yang variatif memungkinkan pengembangan jalur evakuasi dan titik-titik atau areal penyelamatan pada lahan dengan ketinggian >20 meter, sebagai upayaantisipasi terhadap bencana (gempabumi dan gelombang tsunami).
3. Struktur ekonomi Kota Bengkulu didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa sebesar 20,07% serta sektor pengangkutan dan komunikasi.
4. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu didorong oleh pertumbuhan 3 sektor yang memegang andil yang sangat besar yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa.
5. Kinerja ekonomi Kota Bengkulu tumbuh sangat baik, tahun 2006 pertumbuhan Kota Bengkulu di atas Provinsi Bengkulu, mencapai 6,65% sedangkan provinsi sebesar 5,95% bahkan lebih besar dari pertumbuhan nasional.
6. Sektor tersier dan sekunder menjadi sektor andalan yang harus dikembangkan.
7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 cukup tinggi (di atas pertumbuhan nasional).
8. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan dalam skala lokal dan regional.
9. Rencana pengembangan Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan internasional.
10. Pembentukan kawasan industri skala besar dan menengah.

11. Potensi kota sebagai penampung produk-produk daerah/kabupaten di Provinsi Bengkulu.
12. Potensi pengembangan wisata alam (pantai dan danau) dan wisata budaya (situs-situs peninggalan zaman pendudukan Inggris dan Belanda)
13. Ketersediaan sarana dan prasarana skala lokal dan regional akan menjadi modal dasar untuk pengembangan kota dimasa mendatang.

2. Masalah

Selain potensi, Kota Bengkulu juga memiliki beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi perkembangan kota dimasa mendatang, seperti :

1. Sebagian besar wilayah Kota Bengkulu tergolong rawan gelombang pasang (abrasi), tsunami dan rawan gempa bumi.
2. Kawasan sepanjang pantai tergolong rawan terhadap gelombang besar dari laut karena ketinggiannya <20 meter dpl dan kelerengannya <3%.
3. Sebagian dari wilayah Kota Bengkulu termasuk kawasan lindung.
4. Tingkat perkembangan fisik kota relatif lambat dan terkonsentrasi pada koridor-koridor jalan utama kota.
5. Kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk yang tidak merata pada semua bagian wilayah kota.

6. Komposisi mata pencaharian yang belum mencerminkan masyarakat perkotaan.
7. Masih rendahnya minat investasi di Kota Bengkulu (tidak adanya badan yang menangani investasi).
8. Kebutuhan investasi bagi pengembangan kawasan perdagangan dan pelabuhan internasional yang cukup sulit.
9. Produk-produk yang dihasilkan (cinderamata, makanan khas) kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
10. Kualitas SDM relatif masih rendah.
11. Kawasan wisata pantai panjang belum terintegrasi dengan potensi-potensi yang lain (jalan sendiri-sendiri belum saling mendukung).
12. Lahan-lahan pertanian mulai berkurang karena alih fungsi lahan.
13. Izin-izin lokasi di kawasan Pantai Panjang yang diberikan kepada pengusaha perlu ada keseimbangan dengan usaha-usaha kecil.
14. Ekonomi kecil sulit untuk dikembangkan, karena izin-izin untuk usaha kecil sulit untuk diperoleh.
15. Pasar/outlet-outlet/sentra-sentra belum sesuai dengan peruntukan lahan.
16. Belum memiliki kawasan industri pabrikan (skala besar dan menengah ke atas) bagi pengembangan sektor industri.
17. Kawasan perdagangan belum tertata rapi.

18. Souvenir dari Kota Bengkulu relatif harganya mahal dengan kualitas tidak kompetitif
19. Produk yang dihasilkan oleh Kota Bengkulu relatif tidak banyak.
20. Belum berkembangnya Pusat-pusat Pengembangan Kota.
21. Kerjasama dengan dengan kabupaten-kabupaten sekitar masih kurang.
22. Belum terbentuknya struktur ruang yang jelas.
23. Sebaran penggunaan yang belum terpola dengan jelas.
24. Pemanfaatan lahan yang masih terkonsentrasi dan berorientasi ke kawasan pantai.
25. Pemanfaatan hutan lindung (Cagar Alam Dusun Besar) yang masih berlangsung.
26. Pemanfaatan kawasan konservasi Pantai Panjang yang masih berlangsung.
27. Pemanfaatan kawasan di sempadan Sungai Air Hitam dan sempadan Danau Dendam Tak Sudah.

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab tingkat kesadaran hukum bagi pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan B. Kutschinsky tersebut²³, dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum bagi pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa responden pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan/Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan respon bahwasanya faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesadaran dalam pembuatan izin dan merk dagang bagi pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu.

Menurut ketua kelompok nelayan yang ada di kelurahan Malebro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Bapak Hermen, bahwa hampir setiap pelaku usaha yang ada di sekitaran Kelurahan Malebro jenjang

²³ Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 217-219

pendidikannya rata-rata tamatan SMA-SMP sehingga ketika berbicara masalah hukum terkait izin usaha dan pembuatan merk dagang usaha mereka kurang begitu memahami, yang pada akhirnya izin usaha dan merk dagang tidak mereka urus.²⁴

Begitu juga hal yang disampaikan oleh Bapak Ison pemilik usaha ikan kering yang di Malebro, “yang punya saya belum ada izin usaha, begitu juga terkait pembuatan merk dagang, kita membuat label usaha ketika lagi musiman dan itupun tidak di daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga merk dagang hingga saat ini belum di buat”.²⁵

Hampir sama dengan Ibu Rosita sebagai ketua kelompok Koperasi Wanita yang ada di Kecamatan Kampung Melayu Pulobai, berbicara masalah pendidikan sekolah, hampir setiap pelaku usaha yang ada dalam kelompok berpendidikan SMP-SMA dan ada yang bergelar S1. Faktor pendidikan ini juga berpengaruh bagi pelaku usaha yang ada dalam pengurusan izin usaha dan pembuatan merk dagang. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap majunya usaha ikan kering.

Sementara menurut ibu Dra. Suryani sebagai sekeretaris kelompok. Masalah

²⁴ Wawancara dengan Bapak Hermen (Ketua Kelompk) Pemilik Usaha Ikan Kering di Kelurahan Malebro Kota Bengkulu.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ison

pendidikan juga berpengaruh dalam pembuatan izin usaha dan merk dagang, hal ini dilihat dari hampir setiap pelaku usaha tidak berizin dan bermerk dagang. Namun pernah dibuatkan surat izin oleh Lurah itupun dalam rangka persyaratan pencairan bantuan dari dinas terkait.²⁶

Menurut Ibu Siti yang berlatar pendidikan SMP ini, menyatakan bahwa usaha ikan kering kami ini sudah lama, namun terkait masalah usaha belum terdaftar baik izin maupun merk dagang.²⁷

Hal senada dengan Bapak Wahyudin, bahwasanya hampir semua yang pelaku usaha ikan kering yang ada di sekitaran Pulobai tidak berizin dan belum bermerk, karena keterbatasan pendidikan sehingga belum mendaftar.²⁸

2. Pemahaman Hukum

Mengenai pemahaman hukum bagi pelaku usaha ikan kering yang ada di Kota Bengkulu, hampir setiap pelaku usaha kurang begitu memahami terkait masalah izin usaha dan pembuatan merk dagang.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Dra. Suryani (Sekretaris Kelompok) Usaha Ikan Kering di Kawasan Pulobai Kota Bengkulu.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Siti PelakuUsaha Ikan Kering, di Pulobai Bengkulu.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Wahyudin PelakuUsaha Ikan Kering, di Pulobai Bengkulu.

Menurut Ibu Ropita, pelaku usaha yang ada di Pulobai hampir semua anggota tidak paham dan mengerti mengenai bagaimana cara membuat izin usaha dan cara mendaftarkan merk dagang.²⁹

Hal senada juga bagi pelaku usaha yang ada di sekitaran Malebro, kami juga kurang begitu faham dan mengerti mengenai sistem pembuatan dan cara mengurus izin usaha dan pembuatan merk dagang kata Bapak Ison.³⁰

Begitu juga dengan penjelasan dari Bapak Hermen bahwa kami sama sekali kurang begitu faham mengenai pembuatan izin usaha dan merk, sedangkan dari pihak terkait yang mengurus pembuatan izin usaha dan merk dagang belum pernah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan, oleh karena itu hampir setiap pelaku usaha yang ada di sekitaran Malebro belum berizin usaha dan bermerk dagang.³¹

Sementara menurut Ibu Rosita sebagai pelaku usaha ikan kering di Pulobai Kota Bengkulu, juga hampir semua pelaku usaha

²⁹ Wawancara dengan Ibu Ropita Pelaku Usaha Ikan Kering, di Pulobai Bengkulu.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ison Pelaku Usaha Ikan Kering, di Malebro Bengkulu.

³¹ Wawancara dengan Bapak Hermen Pelaku Usaha Ikan Kering, di Malebro Bengkulu.

yang ada tidak begitu mengerti dan memahami terkait masalah izin usaha dan merk dagang.³²

3. Pendapatan (ekonomi)

Terkait mengenai pendafatan bagi pelaku usaha ikan kering yang ada di Kota Bengkulu, ternyata dari hasil wawancara dan penelitian, bahwa faktor penghasilan atau pendapatan ekonomi dari hasil usaha ikan kering juga mempengaruhi tingkat kesadaran hukum mengenai pengurusan izin usaha dan pembuatan merk dagang.

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok usaha ikan kering yang ada di sekitaran Malebro, seperti yang diutarakan bapak Hermen bahwa pendapatan atau hasil dari usaha jualan ikan kering juga sangat mempengaruhi dari pengurusan izin usaha dan pembuatan merk dagang. Seperti yang dia ketahui bahwa penghasilan dari usaha ikan kering cukup untuk keperluan dan kebutuhan sehingga kalau ingin membuat izin usaha dikarenakan berbiaya maka dana untuk pembuatan itu belum bisa, apalagi dalam pembuatan merk dagang juga berbiaya.³³

Hal senada juga yang disampaikan oleh Ibu Dra. Suryani “bahwa hampir semua pelaku

³² Wawancara dengan Ibu Rosita Pelaku Usaha Ikan Kering, di Pulobai Bengkulu.

³³Wawancara dengan Bapak Hermen, Pelaku Usaha Ikan Kering, di Malebro Bengkulu.

usaha ikan kering yang ada di sekitaran Pulobai pendapatan atau penghasilan dari usaha tidak terlalu besar dan cukup untuk keperluan rumah tangga, namun kalau pendapatan dari kami cukup lumayan besar sehingga bisa menguliahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan penjualan usaha ikan kering juga sampai ke luar kota. Akan tetapi masih mengenai izin dan merk dagang juga tidak perlu dibutuhkan.³⁴

4. Sarana Produksi

Sarana produksi bagi pelaku usaha ikan kering yang ada di Kota Bengkulu juga sangat menjadi faktor kurangnya kesadaran hukum dalam pembuatan izin usaha dan merk dagang. Dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha ikan kering yang ada bahwa sarana produksi juga sangat berpengaruh.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Herman bahwa untuk para pelaku usaha ikan kering yang ada di sekitaran Malebro sarana produksi untuk kelompok sudah ada bantuan dan binaan dari beberapa lembaga/instansi seperti dari Universitas Bengkulu yang memberikan bantuan tempat penjemuran ikan kering. Akan tetapi tetap saja bagi pelaku usaha yang ada di Malebro mereka tidak dan belum mengurus dalam pembuatan merk dagang secara resmi yang dikeluarkan oleh

³⁴ Wawancara dengan Ibu Dra. Suryani, Pelaku Usaha Ikan Kering, di Pulobai Bengkulu.

lembaga yang berwenang seperti dari Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi ketika ada musiman dan acara-acara yang besar hampir setiap pelaku usaha membuat merk dagang yang tidak resmi seperti nama toko oleh-oleh “Ban Son” atau nama toko Maju Jaya.

Begitu juga yang disampaikan dengan Bapak Ison dan Syarifudin M, bahwa sarana produksi memang pernah ada bantuan dan binaan dari Kementerian Seperti Ibu Susi memberikan bantuan kepada kelompokk usaha berupa uang yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pendapatan dari usaha ikan kering. Namun tidak untuk mengenai masalah pembuatan izin usaha dan merk dagang bantuan tersebut.

Sama halnya menurut Ibu Rosita sebagai pelaku usaha yang ada di Pulobai, bantuan dari pemerintah sudah ada seperti mesin penggilingan dan pengering, akan tetapi tidak begitu berjalan sesuai yang diharapkan sehingga terkait mengenai pembuatan izin usaha dan merk dagang mereka juga tidak mengurus. Pernah juga ada beberpa anggota kelompok yang mengajukan pinjaman ke Koperasi, namun bukan untuk membeli alat sarana produksi akan tetapi untuk membeli tambahan usaha, jangankan untuk membuat

izin usaha dan merk dagang, modal untuk sarana produksi aja masih tradisional.³⁵

Sedangkan menurut bapak Wahyudin, jangankan sarana produksi yang canggih kadang kala yang tradisional juga masih kurang, sehingga sangat berpengaruh terhadap pendafatan dan pembuatan izin usaha dan merk dagang.

B. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu

Secara umum pelaku usaha memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terlihat dari indikator kesadaran hukum yang rendah yaitu:

1. Pengetahuan terhadap perilaku yang diatur oleh hukum rendah
2. Pemahaman terhadap isi peraturan hukum yang rendah

³⁵ Wawancara dengan Ibu Rosita, Pelaku Usaha Ikan Kering, di Pulobai Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat peneliti simpulkan:

1. Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha ikan kering di Kota Bengkulu yaitu; pendidikan, pemahaman hukum, pendapatan dan bahan serta sarana industri yang masih kurang.
2. Indikator Utama rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha ikan kering yakni; latar pendidikan dan pemahaman hukum yang sangat rendah serta sedikitnya pendapatan/penghasilan sehingga berdampak pada pembuatan izin dan merk dagang tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Kepada setiap pelaku usaha untuk dapat melakukan pendidikan/pelatihan tentang peningkatan produksi, dan pentingnya pembuatan izin usaha dan merk dagang.
2. Bagi pemerintah untuk dapat memberikan informasi dan sosialisasi terkait masalah izin usaha, pembuatan merk dagang dan peningkatan pendapatan produksi.

Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Ikan Kering Di Kota Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta

Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Lexy J. Moleong, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung

Munif Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT.Refika Aditama, Bandung

Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditiya Bakti, Bandung

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal hukum: suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghia Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Ciputat Press, Ciputat, 2002,

Suherman Toha, Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2006.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum: suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003.

Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek